

**EFEKTIVITAS MAJELIS UL DALAM MEMEDIASI
PERTIKAIAN KELUARGA DI MAHKAMAH SYARIAH
SELANGOR**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

AZFAR NAUFAL BIN SAIFUL NIZZAM

NIM. 160101129

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440H/2019M**

**EFEKTIVITAS MAJELIS *ṢULḤ* DALAM MEMEDIASI PERTIKAIAN
KELUARGA DI MAHKAMAH SYARI'AH SELANGOR**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

**AZFAR NAUFAL BIN SAIFUL NIZZAM
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim:160101129**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyah

Pembimbing I,



**Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL
NIP: 196207192001121001**

Pembimbing II,



**Muhammad. Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001**

**EFEKTIVITAS MAJELIS *ṢULḤ* DALAM MEMEDIASI PERTIKAIAN
KELUARGA DI MAHKAMAH SYARIAH SELANGOR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 29 Januari 2019 M
23 Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL
NIP:196207192001121001


Sekretaris,


Muhammad Iqbal, MM
NIP:197005122014111001

Penguji I,



Dr. H. Nasaib Aziz, MA
NIP:195812311988031017

Penguji II,


Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
NIP:2001119301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam
Nim : 160101129
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelarak akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UINAr-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2019
Yang Menyatakan



Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam

ABSTRAK

Nama : Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam
Nim : 160101129
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Efektivitas Majelis *ul* dalam Memediasi Pertikaian Keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor
Tanggal Munaqasyah : 29/1/2019
Tebal Skripsi : 84 halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM

Kata Kunci : *Efektivitas, Majelis ul , Pertikaian, Mahkamah Syari'ah*

Pertikaian sering terjadi dalam rumah tangga apabila melibatkan pasangan suami istri. Ia terjadi apabila salah satu pihak memaksa pihak lain menerima pendapat dan kehendaknya kemudian pihak ini terasa tergugat dengan pihak penggugat. Justru itu diwujudkan Majelis *ul* di Mahkamah Syari'ah dalam menyelesaikan pertikaian suami istri untuk mencari jalan kesepakatan. Rumusan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola yang di terapkan dan bagaimana efektivitas Majelis *ul* di Mahkamah Syari'ah Selangor. Metode dalam penelitan ini menggunakan metode kualitatif berarti penelitian yang menekankan pada kualitas suatu jasa. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Majelis *ul* adalah suatu majelis musyawarah di antara suami dengan istri dan di ketuai oleh Pegawai *ul* . Secara umumnya *ul* merupakan penyelesaian suatu pertikaian antara pihak yang bertikai dalam suatu kasus dengan persetujuan bersama antara mereka sendiri dan bukan diputuskan oleh pihak ketiga. *ul* merupakan salah satu kaedah perdamaian yang efektif kepada pihak bertikai karena ia dapat menghematkan waktu dan biaya selain pola persidangan yang sering berlanjutan dan mengambil waktu yang lama serta biaya yang tinggi. Pola yang diterapkan Majelis *ul* di Mahkamah Syari'ah Selangor dapat membuktikan bahwa adanya efektivitas dalam mengurangi peningkatan kasus tertunda yang mengikat Mahkamah Syari'ah selama ini. Kesuksesan suatu kasus di Majelis *ul* juga disebabkan banyak bergantung kepada pola yang diterapkan dan faktor pihak yang bertikai. Dengan ini dapat dibuktikan bahwa kemampuan Mahkamah Syariah dapat dinaikkan melalui kasus tertunda yang berhasil diselesaikan dan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap pihak Mahkamah Syari'ah. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian secara *ul* ini sangat dianjurkan karena dapat memuaskan hati pihak bertikai berbanding di persidangan yang tidak dapat memberi kepuasan kepada pihak bertikai serta pola yang diterapkan sangat efektif di Majelis *ul* karena penyelesaian di Majelis *ul* ini adalah (*win-win solution*) tiada pihak yang kalah atau rugi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua umumnya, dan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Majelis *Ṣulḥ* dalam Memediasi Pertikaian Keluarga di Mahkamah Syari’ah Selangor”**

Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana berkat jasa beliau pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan indahnya hidup di alam yang disinari dengan kilauan cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah Swt.

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada bapak Dr. H. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., selaku pembimbing I dan Muhammad Iqbal, MM., selaku pembimbing II, di mana pada saat-saat kesibukan beliau menjadi dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum masih dapat menyisihkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang ditargetkan. Juga kepada bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan HK, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, Perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang memberikan pelayanan pinjaman buku-buku yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Kemudian dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Umiminarni Binti Dasuki dan Ayahanda Saiful Nizzam Bin Abdul Rahman yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah peneliti hingga kejenjang pengajian tinggi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak terdapat keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik membangun dari semua pihak senantiasa dinantikan demi memperbaiki penulisan skripsi ini. Semoga dari perbaikan skripsi ini akan bermanfaat dan mempunyai nilai guna bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin.. Billaḥi taufiq wal hidayah...*

Banda Aceh, 16 Januari 2019
Penulis,

Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قال = *qāla*

رَمِي = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Skema Alur Kerja <i>ul</i>	45
Tabel 2 Statistik Keseluruhan Kasus <i>ul</i> 2013- 2017	54
Tabel 3 Persentase Keseluruhan Responden Menjawab Kuesioner	59

DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 1 Grafik Statistik Keseluruhan Kasus ul	55
Diagram 2 Grafik Persentase Responden Yang Menjawab Kuesioner	60

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing

LAMPIRAN 2 Surat Penelitian dari Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

LAMPIRAN 3 Surat Kelulusan Permohonan Data dari Mahkamah Syari'ah Selangor

LAMPIRAN 4 Gambar Penelitian

LAMPIRAN 5 Kasus yang Berhasil dan Kasus yang Gagal

LAMPIRAN 6 Arahan Amalan

LAMPIRAN 7 Kuesioner

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR DIAGRAM.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA PERSPEKTIF UMUM TENTANG <i>UL</i>	
2.1. Pengertian <i>ul</i>	19
2.2. Sejarah Pelaksanaan <i>ul</i>	21
2.3. Asas Praktek <i>ul</i>	24
2.4. <i>ul</i> di Dalam Perundangan Islam di Malaysia	29
2.5. Akibat Hukum Dalam <i>ul</i>	35
BAB TIGA EFEKTIFIVAS MAJELIS <i>UL</i> DALAM MEMEDIASI PERTIKAIAN KELUARGA DI MAHKAMAH SYARI'AH	
3.1. Gambaran Umum Majelis <i>ul</i> di Mahkamah Syari'ah Selangor.....	38
3.2. Dasar Hukum dan Kewenangan Majelis <i>ul</i> Mahkamah Syari'ah Selangor.....	43
3.3. Pola yang di Terapkan Majelis <i>ul</i> dalam Mediasi Pertikaian Keluarga Mahkamah Syari'ah Selangor.....	46
3.4. Efektivitas Pelaksanaan Majelis <i>ul</i> dalam Memediasi Pertikaian Keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor.....	52

3.5. Tahap Kepuasan Pihak Bertikai yang Menghadiri Majelis <i>ul</i> di Mahkamah Syari'ah Selangor	57
3.6. Analisa Penulis.....	62
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	84

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Pada hakikatnya, setiap orang yang membangun rumah tangga berharap untuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah dan wara mah*. Tidak semua kebahagiaan dapat dirasakan karena setiap pasangan memiliki perilaku yang berbeda sehingga tidak ada pemahaman di antara mereka sendiri dan salah satunya mengakibatkan kasih sayang di dalam hubungan antara pasangan berubah dan kasih sayang menjadi berkurang akan menyebabkan terjadinya perceraian sebagai penyelesaian masalah. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dituntut untuk menyelesaikan sengketa karena manusia dibekalkan akal dalam menjalani kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sehingga penegakan keadilan dapat diwujudkan. Meskipun tujuan pernikahan bukan untuk perceraian, tetapi penyebab yang berbeda mengakibatkan perceraian.¹

Pertikaian dan perdebatan sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga karena masalah ini tidak asing dalam kehidupan rumah tangga, terutamanya melibatkan rumah tangga di usia muda. Sejak kebelakangan ini isu di dalam rumah tangga sering terjadi keruntuhan mengakibatkan institusi kekeluargaan semakin hari semakin meningkat kasus, sehingga membawa kepada peningkatan kasus perceraian di Mahkamah Syari'ah. Namun terdapat pola-pola yang dianjurkan oleh Islam untuk

¹ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian keluarga Muslim*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hlm.5.

mendapatkan jalan pendamaian.² Walaupun, perceraian dibolehkan untuk mengakhiri ikatan suami istri sebagaimana ucapan Ibnu Umar yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق (رواه ابي داود)³
Artinya: “Diriwayatkan Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi hallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”. (Hadist Riwayat Abu D d)

Sebaiknya pihak yang berselisih menemukan jalan solusi sebelum membuat keputusan perceraian di Mahkamah Syari'ah karena perceraian akan merugikan kedua belah pihak. Pihak yang bersengketa diperbolehkan untuk mengajukan perceraian jika mereka merasa bahwa tidak ada jalan penyelesaian dan ketika melanjutkan hubungan suami istri membawa kepada keruntuhan dan kemudharatan.

Untuk mengatasi masalah kekeluargaan di Malaysia khususnya di Provinsi Selangor, Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor dalam usahanya mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga telah mengambil tindakan sewajarnya dengan melaksanakan perlaksanaan layanan penyelesaian sengketa secara *ul* dengan mengikut Enakmen Qanun Prosedur Mal Syariah Selangor No 7 tahun 1991.⁴ Negeri Selangor telah memberitakan Kaedah-Kaedah dan Tatacara Mal *ul*

² Norzulaili Mohd Ghazali, Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Alquran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*. (Malaysia: Kolej Universiti Islam Malayisa(KUIM), 2007) hlm.5.

³ Abu D d Sulaim n, *Sunan Abu D d*, jilid 2, (Beirut: D r fikih, 2003) hlm.226

⁴ Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2001 dan kuasa ini dibawah seksyen 147 (1) (c) ETMMS(S) 2003

Selangor tahun 2001 pada bulan Desember. Dan ditegakkan pada tanggal 1 Mei 2002. Ini adalah usaha Jabatan Kehakiman Syariah agar dapat mengatasi dan mengurangi peningkatan kasus kekeluargaan di pengadilan dan mengatasi kasus yang tertunda dalam persidangan.

ul merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang mengikuti keinginan manusia untuk menyelesaikan pertikaian antara kedua belah pihak. Perselisihan ini kadang kala diselesaikan sendiri dengan pendamaian melalui pola yang diterapkan dalam perundangan *ul* atau campur tangan orang ketiga. Manusia berusaha untuk menghindari dan keluar dari permasalahan dan persengketaan yang muncul dalam jangka waktu yang lama. Meskipun permasalahan atau persengketaan yang muncul tidak dapat dihilangkan dari realitas kehidupan manusia. Pencarian pola penyelesaian sengketa terus dilakukan oleh manusia, dalam rangka memenuhi keinginan fitrahnya untuk kehidupan yang damai, aman, adil dan sejahtera. Penerapan *ul* dalam menyelesaikan sengketa akan menjadi payung untuk masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian karena dalam *ul* pihak berpartisipasi aktif untuk mengupaya mencari jalan penyelesaian terhadap sengketa yang dihadapinya.⁵

ul merupakan proses yang dapat mencapai keadilan yang mana tidak ada pihak yang menang atau kalah karena keputusan dibuat dengan persetujuan bersama. Hal ini berbeda dengan keputusan melalui persidangan karena pihak yang lebih

⁵ Syarizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011) hlm.164.

pandai beralasan cenderung untuk menang yang berarti memperoleh sesuatu yang bukan haknya.⁶ Hal yang demikian mendapat ancaman berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

وعن أم سلمة رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فَأَقْضِي لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ أَقْطَعَةً مِنَ النَّارِ (رواه البخاري)⁷

Artinya: Dari Ummu Salamah Ra iyalla u 'anh bahwa Rasulullah hallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Sesungguhnya engkau sekalian selalu mengadukan persengketaan kepadaku. Bisa jadi sebagian darimu lebih pandai mengemukakan alasan daripada yang lainnya, lalu aku memutuskan untuknya seperti yang aku dengar darinya. Maka barangsiapa yang aku berikan kepadanya sesuatu yang menjadi hak saudaranya, sebenarnya aku telah mengambil sepotong api neraka untuknya. (Hadist Riwayat Bukhari)

Di Malaysia ada pola terkait dengan hukum Syari'ah untuk menyelesaikan suatu kasus yang melibatkan kasus klaim atau permohonan. Seperti kasus melanggar janji untuk menikah atau bertunang, tuntutan-tuntutan yang timbul dari suatu perceraian seperti nafkah idah, nafkah tertunda, harta bersama, tuntutan hak asuh anak (*a nah*) dengan melihat kepentingan anak-anak tersebut dalam tempo perkawinan, maupun setelah perceraian, dan lain-lain yang difikirkan sesuai oleh pendaftar.⁸ Di dalam sistem hukum undang-undang Mahkamah Syari'ah di negara

⁶ Fai al bin 'Abdul 'Aziz 'Alu Mub rak , *B l ghul Mar m & Penjelasannya* ,(Jakarta: Ummul Qura ,2015), hlm. 1074-1075.

⁷ Ab 'Abdullah Mu ammad, *a i Al-Bukh ri*, (Bierut: D r Al-kitab Al-'limiyah, 1992), hlm. 454

⁸ Seksyen 61 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 1/2003.

Malaysia terdapat aturan tentang penggunaan mediator sebagai pendamai dalam mediasi yang terjadi diantara pihak-pihak yang bertikai setelah perceraian. Pola yang digunakan Majelis *ul* dalam mediasi merupakan salah satu alternatif yang efektif untuk mencari pendamaian dalam pertikaianan masyarakat. Efektivitas pelaksanaan *ul* di Mahkamah Syari'ah dapat membuktikan bahwa pola yang digunakan mampu untuk mengurangi kasus tertunda yang membelenggu Mahkamah Syari'ah selama ini.

Sejak kaedah *ul* diperkenalkan di Mahkamah Syari'ah Selangor, banyak kasus dapat diselesaikan di luar mahkamah. Pada tahun 2014 dari Januari hingga Desember 2014, dari 2534 kasus yang didaftarkan kepada pegawai *ul* , 1045 kasus yang dapat diselesaikan, 484 kasus dibawa ke hadapan hakim untuk persidangan, serta 758 kasus tidak dihadiri oleh pihak bertikai. Pada persentase kasus yang berhasil diselesaikan sebanyak 68% dan persentase kasus yang ditangani Majelis *ul* sebanyak 90%.⁹ Ini menunjukkan keberhasilan pola yang digunakan *ul* dalam mediasi menimbulkan pertanyaan tentang pola yang diterapkan oleh Majelis *ul* . Kesuksesan penyelesaian kasus di luar pengadilan dapat mengurangi kasus yang perlu dibawa ke hadapan hakim untuk persidangan di Mahkamah Syari'ah dan seterusnya mengurangkan kasus yang meningkat dan tertunda.

Oleh karena itu, pola Majelis *ul* sangat penting untuk dijadikan saranan dan penerapan dalam masyarakat, karena *ul* dalam menyelesaikan sengketa akan menjadi penyelamat untuk masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. Asas pelaksanaan pola Majelis *ul* ini ialah untuk menganjurkan penyelesaian

⁹ Laporan Keseluruhan Statistik Kasus Sulh Jabatan Kehakiman Syariah Selangor 2014

tuntutan secara perdamaian tanpa melalui proses persidangan di Mahkamah Syari'ah. Usaha untuk menganjurkan pihak-pihak yang bertikai terkait masalah kekeluargaan beralih kepada proses penyelesaian secara perdamaian ini sejalan dengan ajaran Islam yang amat menganjurkan umatnya memilih perdamaian.

Dari permasalahan yang dijelaskan di atas, penelitian ini semakin penting apabila pola yang diterapkan Majelis *ul* dalam mediasi dapat menyelesaikan sengketa keluarga dan memberi dampak yang positif pada masyarakat, karena hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara individu maupun institusi untuk memilih sulh sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Majelis *ul* dalam Memediasi Pertikaianan Keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor”**

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pola yang di terapkan Majelis *ul* dalam menyelesaikan pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor
- 2) Bagaimana efektivitas Majelis *ul* dalam menyelesaikan pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui pola yang di terapkan Majelis *ul* dalam menyelesaikan mediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor
- 2) Untuk mengetahui efektivitas Majelis *ul* dalam menyelesaikan mediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor

1.4. Penjelasan Istilah.

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dalam memahami penelitian yang berkenaan “Efektivitas Majelis *ul* dalam Mediasi Pertikaianan Keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor”. Maka di sini penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

Efektivitas

Majelis *ul*

Mediasi

Mahkamah Syari'ah

1.4.1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata ini memiliki empat makna, yaitu, (1) ada efeknya atau akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya, (2) manjur atau mujarab (tentang obat), (3) dapat membawa hasil, atau berhasil (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang atau peraturan).¹⁰ Efektivitas di artikan keefektifan (sesuatu keberhasilan) sesuatu keberhasilan itu dapat dilihat daripada

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 284

hasil yang diperoleh seberapa jauh tercapainya suatu tujuan kuantitas dan kualitas yang telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.¹¹ Maksud istilah efektivitas dalam penelitian ini yaitu keefektifan, atau suatu keberhasilan penyelesaian kasus di Mahkamah Syariah Selangor. Kebijakan ini diberikan oleh Mahkamah Syariah kepada Majelis *ul* untuk membantu dalam mengurangi peningkatan kasus yang mengikat Mahkamah Syari'ah Selangor.

1.4.2. Majelis *ul*

Majelis *ul* adalah merupakan salah satu prosedur untuk menyelesaikan masalah antara pasangan suami istri sebelum masalah tersebut dibawa ke tingkat yang lebih tinggi dalam Mahkamah Syari'ah. Majelis *ul* juga merupakan suatu majelis musyawarah di antara suami dengan istri dan di ketuai oleh pegawai *ul* mengikut Manual Kerja *ul*. Secara umumnya *ul* merupakan penyelesaian suatu pertikaian antara pihak yang bertikai dalam sesuatu isu dengan cara persetujuan bersama antara mereka sendiri dan bukannya diputuskan oleh pihak ketiga.¹² Di dalam Majelis *ul* di anggotai oleh seorang pegawai *ul* yang berwenang sebagai mediator dalam memediasi pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan dan

¹¹ Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan Edisi Pertama*, Cet2, (Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992), hlm. 615

¹² www.esyariah.gov.my, *Esyari'ah*, Diakses melalui situs: <http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/BM+Sulh/Proses+Pengendalian+Majlis+Sulh+Di+Mahkamah+Syariah>, tanggal 21 April 2018

pendamaian.¹³ Menurut penulis sendiri Majelis *Sulh* diwujudkan di bawah Mahkamah Syari'ah karena untuk membantu Mahkamah Syari'ah mempermudah proses pengurangan kasus yang terdaftar yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan memberi jalan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bertikai melalui proses pendamaian di Majelis *ul* .

1.4.3. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Menurut Syarizal Abbas makna mediasi menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Bermakna mediator harus berada pada posisi tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama.¹⁴ Menurut Takdir Rahmadi menyatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan.¹⁵ Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁶

¹³ Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, *Seksyen Sulh*, Diakses melalui situs: <http://www.mswp.gov.my/index.php/ms/mengenai-mswp-2/bahagian-unit/bahagian-pengurusan-pendaftaran-ke-hakiman/seksyen-sulh?showall=&limitstart>, pada tanggal 15 Mei 2018

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam...* hlm.2.

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm.12.

¹⁶ Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), hlm. 932.

Menurut penulis sendiri memediasi atau dikenali sebagai mediasi adalah suatu proses rundingan damai antara pihak yang bertikai yang diketuai oleh mediator dan mediator akan mencari jalan penyelesaian agar kedua belah pihak yang bertikai mendapat kesepakatan tanpa ada kerugian atau lebih dikenali sebagai *win-win solution*. Selain itu mediasi merupakan salah satu alternatif yang digunakan dalam mediasi pertikaian keluarga oleh Majlis *ul* di Mahkamah Syari'ah di Malaysia.

1.4.4. Mahkamah Syari'ah

Mahkamah Syari'ah adalah Pengadilan Agama yang berwenang dalam menegakkan hukum. Mahkamah Syari'ah ditubuhkan oleh Enakmen.¹⁷ Pengurusan Agama Islam Negeri yang berfungsi untuk membicarakan kasus-kasus yang telah diperuntukan oleh Enakmen. Mahkamah Syari'ah lembaga peradilan yang memproses serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam untuk kesalahan sipil dan jinayah agama sesuai kewenangan yang diberikan untuknya.¹⁸ Menurut penulis sendiri Mahkamah Syari'ah ditubuhkan untuk menjalankan peraturan dan peruntukan Undang-undang Pengurusan Agama Islam untuk setiap negeri di Malaysia. Selain itu Mahkamah Syari'ah didirikan untuk menghakimi kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam yang tidak mematuhi peraturan berdasarkan Enakmen yang dibuat. Mahkamah Syari'ah juga berwenang dalam mengadili dan memutuskan setiap

¹⁷ Enakmen bermaksud klasifikasi (cabang) dari Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

¹⁸ Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu Ensiklopedia Bebas*, Diakses melalui situs: https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia, pada tanggal 11 April 2018

permasalahan yang terjadi kepada orang Islam di Malaysia dalam pertikaianan kekeluargaan.

1.5. Kajian Pustaka.

Dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis menemukan bahan-bahan yang berkaitan skripsi penulis yang berkaitan dengan efektivitas Majelis *ul* dalam memediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor

Pada skripsi Mustika Binti Muda,¹⁹ membahas tentang Peran Majelis *ul* Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Mahkamah Syari'ah (Kajian Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Terengganu). Di dalam skripsi ini menjelaskan peran Majelis *ul* di Mahkamah Syari'ah Terengganu dalam penyelesaian pihak yang bersengketa. Di dalam penulisan skripsi ini mustika lebih menekankan atau mengutamakan mengenai peran Majelis *ulh* di Mahkamah Syariah Terengganu.

Menurut Siti Umu Kulsum, dalam skripsinya menjelaskan Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Perspektif Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi (Analisa Pasca Pemberlakuan Perma No 1 Tahun 2008 Pengadilan Agama Jakarta Timur). Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana prosedur dan pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian dan mediasi merupakan alternatif penyelesaian untuk pihak yang bersengketa selain persidangan untuk mendapatkan kesepakatan. Mediasi

¹⁹ Mustika Binti Muda, "*Peran Majelis Sulh Dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga*" (Kajian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Terengganu), Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2013

adalah termasuk di antara negosiasi yang terbaik dalam menyelesaikan konflik. Mediasi merupakan alternatif yang menjanjikan konsep sama-sama untung ("*win-win solution*").²⁰

Raihanah Azahari menyatakan di dalam bukunya. *ul* dalam kasus kekeluargaan Islam adalah salah satu konsep penyelesaian pendamaian pihak yang sengketa tanpa melibatkan lembaga pengadilan yang formal di Mahkamah Syari'ah. Pelaksanaan *ul* dapat memberi alternatif kepada pihak bertikai untuk menyelesaikan pertikaianan melalui Majelis *ul*. Penyelesaian dapat dilakukan kepada pihak yang bertikai untuk mencapai pendamaian.²¹

Penelitian ini berbeda dengan karya ilmiah yang digunakan dalam kajian pustaka di atas karena penelitian ini merupakan penelitian berkaitan pola yang diterapkan dan efektivitas Majelis *ul* dalam memediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor.

1.6. Metode Penelitian.

Dalam penyusunan penulisan ini metode penelitian sangat menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan sistematis karena metode yang dipakai mempengaruhi kualitas sesuatu penulisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berarti penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena

²⁰ Siti umu Kulsum, *Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Perspektif Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi (Analisa Pasca Pemberlakuan Perma No 1 Tahun 2008 Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010

²¹ Raihanah Azahari, *Sulh dalam Kasus Kekeluargaan Islam*, (Malaysia : Universitas Malaya, 2008)

sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.²² Metode ini dimulai dengan pengumpulan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui teknik survei, studi kasus, studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku dan analisis dokumenter.²³ Dalam pembahasan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Penelitian Kepustakaan.

Metode ini dilakukan dengan cara menelaah beberapa buku atau literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, seperti: Kitab Fiqih Islam Wa A illatu u yang memproses tentang *Al- ul u* berkaitan macam-macam dan syarat *ul* ,²⁴ dan di dalam buku Pengenalan dan Keberkesanan *ul* di Mahkamah Syari'ah ada menjelaskan mengenai konsep *ul* yang berkaitan dengan definisi dan sejarah pelaksanaan *ul* ,²⁵ dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber referensi skripsi ini. Adapun jenis data dari karya ini adalah terdiri dari data primer, yaitu bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas, diperoleh langsung dari Al-Quran. Kemudian data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk mengetahui teori-teori atau pendapat yang menyangkut penelitian

²² M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 25

²³ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm.16

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh (Jaminan, Pengalihan Utang, Gadai Paksaan, Kepemilikan)*, Jilid 6 (Kuala Lumpur : Darul Fikir, 2011), hlm. 235

²⁵ Adzidah Yaakob, Mohamad Zaharuddin Zakaria, Asmidah Ahmad, Kamilah Wati Mohd, Mustafa Afifi Ab Halim, *Pengenalan dan Keberkesanan Sulh Di Mahkamah Syariah* (Negeri Sembilan : Universiti Sains Islam Malaysia,2016), hlm.15

dan pembahasan dalam skripsi ini. Data sekunder juga digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dengan cara memperdalam buku-buku atau literatur yang relevan. Penulis juga menggunakan penjelasan dari kamus, jurnal dan situs yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

1.6.2. Penelitian Lapangan.

Pada metode ini dilakukan riset di Mahkamah Syari'ah Selangor tentang efektivitas pola yang diterapkan Majelis *ul* dalam mediasi. Dalam mencari data-data yang diperlukan dalam skripsi ini. Data diperoleh melalui:

1.6.2.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi.²⁶ Penulis secara langsung pergi ke lapangan yaitu ke Jabatan Kehakiman Syari'ah Negeri Selangor untuk memperoleh informasi yang berkaitan.

Responden atau informasi yang dijadikan dalam penelitian ini pegawai *ul*, hakim dan pihak yang menghadiri Majelis *ul* di Mahkamah Syari'ah Negeri Selangor.

1.6.2.2. Wawancara

²⁶ H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.104

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon, email dan lain-lain.²⁷

. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada responden. Responden atau informasi yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah pegawai *ul* dan hakim yang berada dilokasi penelitian Jabatan Kehakiman Syari'ah Negeri Selangor.

1.6.2.3.Data Dokumentasi

Data Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.²⁸ Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti mengetahui lebih mendalam kajian yang dilakukan.

Bahan dokumentasi dalam penelitian ini berupa undang-undang yang di daftarkan di Mahkamah Syari'ah dan surat edaran hakim, juga informasi Majelis *ul* , Mahkamah Syari'ah dan dari situs.

²⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet.10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.113

²⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet.1, (Indonesia: Kencana, 2011), hlm.141

1.6.2.4. Angket (Kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan/ Pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut. Instrumen berupa lembar daftar pertanyaan dapat berupa angket (kuesioner), *checklist* atau skala²⁹

Dalam penelitian ini, dilakukan angket (kuesioner) kepada responden pihak bertikai yang menghadiri ke Majelis *ul* di Mahkamah Syariah Selangor.

1.6.3. Metode Analisis Data.

Dalam metode analisis data yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penulis menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang penulis peroleh dilapangan hasil wawancara.

Penulis juga mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi, diolah untuk ditentukan data-data yang akurat, kemudian data-data tersebut dideskripsikan serta ditafsirkan untuk dijadikan kesimpulan. Selanjutnya dibuat kesimpulan yang menjawab permasalahan penulis yang di kemukakan sebelumnya. Melalui metode deskriptif, penulis dapat mengetahui bagaimana efektivitas Majelis *ul* dalam mediasi pertikaian keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor.

²⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 49

1.6.4. Teknik Analisis Data.

Setelah data diperoleh oleh peneliti ditemukan dan dianalisis yang terkumpul dari berbagai metode riset kualitatif, kemudian dideskriptifkan sesuai dengan hasil yang ditemukan dilapangan, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat memberikan hasil serta kesimpulan tentang efektivitas dan pola Majelis *ul* dalam mediasi pertikaian keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor.

1.6.5. Teknik Penulisan.

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi dengan ketentuan yang telah ada, dan dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang ditetapkan pada Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014

1.7. Sistematika Pembahasan.

Untuk menghasilkan suatu pembahasan yang komprehensif dan sistematis, pembahasan ini diuntukkan kepada empat bab. Setiap bab akan membahas sub-sub tertentu dan diantara sub-sub tertentu ada hubungannya antara satu dengan yang lain yang mana telah disusun dalam bab-bab sebagai berikut.

Bab Satu, penulis menjelaskan mengenai bab pendahuluan dimana dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi metode pengumpulan data, pendekatan dan analisis, dan terakhir berkaitan sistematika pembahasan.

Bab Dua, penulis menjelaskan dan menerangkan tentang perspektif umum tentang *ul*. Di dalam bab ini di per jelaskan lagi mengenai pengertian *ul*, asas praktek *ul*, sejarah pelaksanaan *ul*, peruntukan undang-undang *ul* dan akibat hukum dalam *ul*.

Bab Tiga, merupakan bab inti yang akan di bahas oleh penulis tentang efektivitas Majelis *ul* dalam mediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor. Dalam bab ini juga diperjelaskan lagi mengenai gambaran umum Majelis *ul* Mahkamah Syari'ah Selangor, dasar hukum dan kewenangan Majelis *ul* Mahkamah Syari'ah Selangor, pola yang di terapkan Majelis *ul* dalam memediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor, efektivitas pelaksanaan Majelis *ul* dalam memediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor, tahap kepuasan pihak bertikai yang menghadiri Majelis *ul* di Mahkamah Syari'ah Selangor, dan analisa penulis.

Bab Empat, merupakan bab yang terakhir di dalam penelitian ini adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penulis terhadap pembahasan skripsi tentang efektivitas Majelis *ul* dalam memediasi pertikaianan keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor dan di harapkan dapat memberi satu solusi untuk masalah yang dihadapi pada masa kini dan masa yang akan datang.

BAB DUA

PERSPEKTIF UMUM TENTANG UL

2.1. Pengertian ul .

ul dari sudut bahasa adalah perkataan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Al- ul u* dan merupakan kata nama (*al-ism*) yang berasal dari kata kerja (*al-f'il*) secara menyeluruh berarti *al-ta lu wa al-mu la a* , yaitu merupakan perdamaian setelah terjadi perselisihan. Ar-R ghib al-Af i ni menyatakan bahwa *ul* dikhususkan untuk tujuan mengakhiri pertikaian di antara manusia.¹ Selain itu, ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ilmuwan mengenai *ul* ini. Secara umumnya definisi-definisi yang diberikan membawa pengertian yang sama.

Menurut 'Abdullah bin 'Abdurra man Al-Bass m dalam kitabnya menyatakan *Al- ul u* secara etimologi adalah menentukan pertikaian, secara terminologi *ul* adalah melakukan perjanjian yang mengantar kepada kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bertikai demi memutuskan pertikaian. Perdamaian salah satu upaya menarik kebaikan dan menolak keburukan demi menjaga kemaslahatan.² Oleh karena itu, perdamaian merupakan akad yang paling besar manfaatnya dalam umat Islam karena tidak ada pihak yang dirugikan malah kedua belah pihak mendapatkan hak masing-masing dalam proses perdamaian.

¹ Raihanah Azahari, *Sulh dalam Kasus Kekeluargaan Islam*, (Malaysia : Universitas Malaya, 2008), hlm 32

² 'Abdullah bin 'Abdurra man Al Bass m, *Syarah B l ghul Mar m, jilid4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 529

Selain itu, Suzana Ghazali seorang perunding psikologi keluarga dan pengacara syar'i di Malaysia dalam penulisannya menyatakan *ul* membawa maksud putus pertengkaran atau bermakna kompromi. Merupakan upaya untuk memperoleh kesepakatan di antara kedua belah pihak yang saling berbeda pendapat atau pihak yang berselisih paham, ia juga dapat dikatakan sebagai konsep untuk mendapat kesepakatan melalui komunikasi.

Di dalam amalan perundangan sipil, *ul* dikenali sebagai *mediation*. Para ulama fiqih mendefinisikan *ul* sebagai satu ikatan perjanjian atau kontrak bersama untuk mencapai perdamaian antara dua belah pihak atau lebih, yang berselisih paham atau bertikai. Para ulama juga bersepakat menjadikan *ul* ini sebagai satu bentuk perundangan memandangkan banyak manfaatnya termasuklah menyelesaikan perselisihan dan pertikaian antara suami dan istri.³

Ada juga yang merujuk *ul* dalam maksud yang lain yaitu Mediasi. Mediasi boleh didefinisikan sebagai “proses di mana satu pihak (pihak ketiga atau mediator) membantu dua pihak yang bertikai antara satu sama lain berunding dan mencapai penyelesaian secara damai”. Ini bermakna mediasi merupakan ‘perundingan secara terpimpin’ (*assisted negotiation*) secara langsung kepada pihak-pihak yang bertikai oleh mediator.⁴

³ Suzana Ghazali, *Buatmu Wanita: Sebagai Anak Istri- Ketahui Hakmu*, (Selangor Darul Ehsan : Buku Prima Sdn.Bhd., 2009), hal. 296

⁴ Siti Noraini dan Zulkifli Hasan, *Perlaksanaan ul dan Keberkesananny di Mahkamah Syariah Selangor*. Diakses melalui situs: <https://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/07/sulhdi-mahkamah-syariah.pdf> pada tanggal 26 April 2018

Dari pengertian yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan *ul* merupakan penyelesaian suatu pertikaian antara pihak yang bertikai dalam suatu isu dengan cara persetujuan bersama antara mereka sendiri, bukannya diputuskan pihak ketiga yang lain. *ul* sebagai akad penyelesaian, untuk mencapai akad penyelesaian tersebut berbagai macam cara boleh digunakan selama cara tersebut tidak bertentangan dengan hukum syarak. Ia juga merupakan akad yang menyelesaikan pertikaian yang akan terjadi. dan keridhaan dari kedua-dua belah pihak yang bersengketa amat penting dalam efektifitas sesuatu proses *ul* yang mana ia merujuk untuk mencari jalan penyelesaian antara kedua-dua pihak yang bersengketa.

2.2. Sejarah Pelaksanaan *ul* .

Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam telah pun mengamalkan *ul* dalam menyelesaikan pertikaian yang timbul dalam kalangan mereka. Pada kebiasaannya, mereka akan melantik pengantara atau wasit sebagai orang tengah dalam menyelesaikan sesuatu pertikaian. Pengantara atau wasit ini biasanya terdiri daripada kalangan ketua kabilah.

2.2.1. Sumber Data.

Sejarah zaman Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul pernah dilantik menjadi wasit dalam pertikaian yang melibatkan pembesar-pembesar Quraisy berhubungan tentang *ajar Aswad*. Pada mulanya pembesar-pembesar Quraisy tidak mau bertoleransi dalam pertikaian mengenai siapa yang berhak meletakkan *ajar Aswad* (batu hitam pada sisi Kaabah) ke tempat asalnya. Rasulullah SAW akhirnya

dilantik untuk menyelesaikan pertikaian tersebut dan para pembesar bersetuju dengan kaedah penyelesaian yang dilakukan oleh Dalamnda SAW.⁵

Peristiwa ini dikenal baik oleh umat Islam di seluruh dunia. Peletakan *ajar Aswad* memiliki nilai dan strategi resolusi konflik (sengketa) terutama mediasi dan negosiasi. Selain itu, kejadian ini dapat dipandang sebagai tahap akhir dari konflik yang berkepanjangan yang hampir mengakibatkan pertumpahan darah para pembesar Quraisy.⁶

Sebagaimana baginda juga pernah mengadakan perdamaian dengan penduduk Najran dengan syarat mereka membayar sejumlah harta. Dan juga mengadakan perdamaian dengan penduduk Bahrain dengan syarat mereka membayar sejumlah *ji yah* kepada baginda dan juga mengadakan perdamaian dengan ‘Ukaidir Daumah sehingga darahnya dilindungi dengan syarat membayar *ji yah*.⁷

Praktek *ul* ini telah diteruskan oleh para sahabat ketika pemerintahan Khulafa’ al-R syidin. Pada zaman Saidina Abu Bakar telah melantik Saidina ‘Umar menjadi *Qa hi* di Madinah untuk membantunya dalam urusan kehakiman. Namun setelah setahun Saidina ‘Umar menjadi *Qa hi* tidak ada satu kasus yang diajukan kepada ‘Umar. Ini karena beliau telah menggariskan beberapa prinsip asas dalam pentadbiran kehakiman yang terkandung dalam *Ris lah al-Qad*’. Salah satu prinsip

⁵ Adzidah Yaakob, *Pengenalan dan Keberkesanan...*, hlm 11

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum...*, hlm 166

⁷ Ab Bakar J bir Al-Jaza’iri, *Min aj al-Muslim Panduan Hidup Muslim Sempurna*, cet 1 (Malaysia: Karangraf, 2015), hlm. 855

yang dinyatakan dalam risalah tersebut adalah penegasan Saidina ‘Umar tentang keharusan mengadakan *ul*⁸

Pada zaman Ban Umayyah dan Ban Abb siyyah perubahan banyak terjadi dalam sistem kehakiman menyebabkan peranan *ul* tidak lagi diutamakan karena pada masa itu sistem kehakiman Islam lebih berkembang dan akhirnya pada zaman Kh lifah ‘U maniyyah terjadi kejatuhan pemerintahan, penjajah mulai menguasai sebagian besar dunia Islam. Kedudukan negara-negara Islam menjadi lemah. Pelaksanaan undang-undang Islam mulai diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Konvensional Barat. Akhirnya telah menggantikan peranan *ul* dalam menyelesaikan pertikaian.⁹

Dapat dijelaskan bahwa praktek *ul* dalam menyelesaikan pertikaian telah lama dilaksanakan dalam masyarakat pra Islam dan kemudian diteruskan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan kerajaan Islam seterusnya. Walaupun tidak terdapat satu kerangka undang-undang yang jelas berhubungan masa pelaksanaannya, tetapi telah dilaksanakan dalam masyarakat karena kecenderungan mereka untuk merujuk pertelingkahan yang timbul kepada pihak-pihak yang beribawa dalam masyarakat seperti ketua kabilah, pemimpin setempat. Prakteknya bukan hanya terbatas kepada kasus kekeluargaan tetapi diperluaskan kepada pertikaian komersial dan politik.¹⁰

⁸ Adzidah Yaakob, *Pengenalan dan Keberkesanan...*, hlm. 14

⁹ Raihanah Azahari, *Sulh dalam Kasus...*, hlm 9

¹⁰ Adzidah Yaakob, *Pengenalan dan Keberkesanan...*, hlm 15

Masa pelaksanaan *ul* diberi keutamaan dalam menyelesaikan, tanpa mengira yang telah dibawa ke mahkamah atau tidak. Rasulullah SAW selalu mngutamakan penyelesaian secara damai. Oleh sebab itu masa pelaksanaan *ul* boleh dilaksanakan kapan saja, baik sebelum atau sesudah pertikaian dirujuk ke mahkamah. Dalam konteks semasa, kesesuaian *ul* untuk menangani kasus-kasus pertikaian keluarga dilihat baik terutamanya apabila pola persidangan mahkamah menimbulkan masalah kepada pihak yang terlibat dalam pertikaian dan seterusnya memberi dampak terhadap institusi kekeluargaan.¹¹

2.3. Asas Praktek *ul* .

Asas praktek *ul* terdapat dari dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Hadist yang telah ditetapkan dan menganjurkan melaksanakan *ul* dalam berkaitan pertikaian, sengketa atau konflik. Di antara dalil-dalil pensyariatan yang dirujuk berkaitan dengan *ul* sebagai berikut:

2.3.1. Dalil Al-Quran Al-Karim.

ul merupakan kaedah atau jalur dalam penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam syariat Islam. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang berkaitan *ul* atau perdamaian.

¹¹ Raihanah Azahari, *Sulh dalam Kasus...*, hlm 48

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا¹²

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir bahwa suami menjauhkan diri (*nusyuz*) dari dia atau menalaknya, maka tidak ada keberatan dalam mereka berdua mengadakan perdamaian yang sesungguhnya-sungguhnya. Perdamaian itu lebih baik (dalam mereka), sedangkan manusia ditabiatnya kikir. dan jika kamu terjadi baik (ihsan) dan terjadi takwa, maka sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs: Al-Nisa: 4: 128).

Ayat ini menjelaskan bahwa perdamaian antara suami istri yang bersengketa hukumnya dibolehkan. Seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich menyatakan meskipun ayat ini konteksnya berkaitan dengan perdamaian dalam urusan suami istri, namun hukum perdamaianya sendiri bisa diperluas untuk bidang muamalah.¹³

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisa ayat 114:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا¹⁴﴾

¹² Mu ammad asbi ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul M jid an-N r Jilid 1* (surat 1-4). (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 962-963

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 482

¹⁴ Mu ammad asb a h- hiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul...*, hlm. 952

Artinya: Tak ada kebajikan pada bisikan mereka, kecuali bisikan orang-orang yang menyuruh memberi sedekah dan berbuat makruf atau mendamaikan manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mengharap keridhaan Allah, kelak akan Kami berikan pahala yang besar kepadanya (Qs: Al-Nisa: 4: 114).

Ayat ini menjelaskan bahwa memberikan sedekah, menyuruh makruf dan membuat perdamaian secara tersembunyi (tidak dipertunjukkan kepada umum). Seperti yang dikutip Muhammad Hasbi dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid menyatakan memberikan sedekah kepada seseorang mungkin menyakiti dan merendahkan harga dirinya. Menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran lebih berhasil apabila dilakukan tidak secara terang-terangan. Demikian pula mendamaikan manusia secara diam-diam dan tidak di muka umum, lebih memungkinkan tujuan yang ingin dicapainya bisa terwujud.¹⁵

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا^ط فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ^ج فَإِنْ فَأْتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا^ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ^{١٦}

Artinya: Dan kalau ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara kedua-duanya. Jika salah satu daripada kedua-duanya menzalimi golongan yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu sudah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya

¹⁵ Mu ammad asb a h- hiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul...*, hlm. 952 hlm. 953

¹⁶ Hussamuddin Yaacub, *Al-Quran Perkata Kaedah Berwarna*, (Malaysia: Karya Bestari, 2016), hlm 515

dengan adil, dan terjadi adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang terjadi adil. (Qs: Al-Hujurat : 49 : 9).

Ayat ini sebagai dasar dalam pihak yang berselisih untuk menjadikan *ul* sebagai sarana mewujudkan perdamaian. Seperti yang dinyatakan Syarizal Abbas dalam penjelasannya bahwa upaya perdamaian merupakan jalan terbaik untuk kamu menyelesaikan pertikaian. Sekaligus mendorong para pihak untuk menggunakan *ul* dalam mengakhiri pertikaian untuk mencapai perdamaian.¹⁷

2.3.2. Dalil Hadits.

Rasulullah SAW amat mendorong umatnya untuk mencari jalan perdamaian dan menghindari pertikaian sesama sendiri. Dapat ditemukan dalam sebuah hadits berkaitan *ul* diriwayatkan oleh ‘Amru bin ‘Auf Al Muzani. Rasulullah SAW bersabda:

عَمْرُو بْنُ عَوْفِ الْمُزْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذي)¹⁸

Artinya : Diriwayatkan oleh ‘Amru bin ‘Auf Al Muzani menceritakan kepada kami dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : perdamaian diantara umat Islam diperbolehkan kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan umat Islam boleh memenuhi syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum...*, hlm. 206

¹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku no 2, Cet 2.(Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 110

mengharamkan sesuatu yang halal atau meghalalkan sesuatu yang haram”
Hadits ini adalah hasan shahih (Hadits riwayat At-Tirmi i)

Hadits ini adalah dalil tentang kebolehan perdamaian dalam segala sesuatu, jika tidak bertentangan dengan syariat. Al-Syawk ni berkata, “Perdamaian itu boleh dilakukan terhadap sesuatu yang sudah diketahui dan tidak diketahui. Hadits ini menunjukkan keharusan memenuhi persyaratan-persyaratan yang tidak bertentangan dengan syariat dalam semua transaksi.¹⁹

Selain itu Ibnu ajar, seperti yang dikutip oleh Raihanah Azahari menjelaskan dalam *al-Fat* , “Perdamaian itu ada bermacam-macam, yaitu: perdamaian seorang Islam dengan orang kafir, perdamaian antara suami dan istri, perdamaian antara kelompok yang memberontak dengan kelompok yang adil, perdamaian antara dua pihak yang saling membenci, perdamaian dalam hal kecelakaan seperti membebaskan biaya, perdamaian demi menyelesaikan pertikaian dan lain-lain.²⁰ Oleh demikian bahwa setiap penyelesaian haruslah dalam kerangka yang berlandaskan hukum syarak dan segala jenis penyelesaian *ul* yang menyalahi hukum syarak adalah tidak sah.

2.3.3. Dasar dari Ijma'.

Ulama Islam sepanjang zaman sependapat bahwa akad perundingan haruslah mengikuti dengan hukum syarak. Ada dalil yang menunjukkan adanya kesepakatan para ulama di kalangan sahabat mengenai amalan *ul* . Saidina ‘Umar al-Kha ab r.a.

¹⁹ Fai al bin ‘Abdul ‘Aziz ‘Alu Mub rak , *B l ghul mar m...*, hlm. 639

²⁰ ‘Abdul Q dir Syaibah al- amad,, *Fiq ul Islam Syara B l ghul Mar m*, Jilid 5. (Jakarta: D rul Haq, 2007), hlm. 310-311

berkata : “Suruhlah mereka yang bertelingkah supaya duduk semeja agar mereka berunding. Jika hakim memutuskan, mereka akan saling membenci“. Kata-kata Saidina ‘Umar r.a. ini diucapkan di hadapan para sahabat dan tidak sesiapaupun yang membantahnya. Dengan ini mereka mencapai kata sepakat bahwa rundingan (*ul*) dibenarkan oleh syarak”. *ul* juga dibenarkan sekiranya perkara itu melibatkan hak manusia dan tidak dibenarkan di dalam kasus yang melibatkan hak Allah seperti *udud*.²¹

Dari penjelasan hadits oleh Saidina ‘Umar al-Kha ab r.a ini menunjukkan bahwa amalan *ul* telah disepakati sebagai kaedah yang sesuai untuk penyelesaian terhadap pertikaian yang terjadi pada manusia dan dijelaskan juga bahwa keputusan di mahkamah lebih meninggalkan dampak yang buruk kepada manusia.

2.4. *ul* di Dalam Perundangan Islam di Malaysia.

Jika diteliti undang-undang syari’ah yang digariskan di Malaysia, Pelaksanaan *ul* berdasarkan undang-undang syari’ah setiap provinsi masing-masing yang mana pelaksanaannya dalam mencari solusi perdamaian dan dikenal sebagai Majelis *ul* . Setiap provinsi mempunyai peraturan berbeda. Namun demikian terdapat peruntukan mengenai *ul* dan meletakkan bahwa *ul* itu dalam suatu bentuk proses berdasarkan prosedur tertentu yang diharuskan. Maka dapat disimpulkan bahwa *ul* merupakan keputusan atau hasil dari suatu perdamaian atau kesepakatan oleh pihak-

²¹ Norita Kamaruddin, *Konsep Sulh Menurut Perspektif Islam Dan Aplikasinya Dalam Mahkamah Syariah Di Malaysia, (IRSYAD no 1002)*, (Malaysia: Kuis, 2016), hlm. 31

pihak yang bertikai dan bersengketa. Majelis *ul* merupakan suatu proses perundingan dipimpin yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Hukum Syarak' dan undang-undang.²²

Pelaksanaan *ul* di Mahkamah Syari'ah secara tidak resmi telah di pratekkan oleh pendaftar dan penolong pendaftar Mahkamah Syari'ah dan para Pengacara Syar'i malah adakalanya datang dari perintah daripada Hakim Syar'i. Perundingan dibuat mengikut kehendak klien dan mengikut kesempatan masa sebelum atau semasa prosedur persidangan. Draf pertama berkaitan *ul* telah diwujudkan oleh Lembaga Teknis Undang-Undang Syarak dan Sivil Kebangsaan yang dinamakan Kaedah-Kaedah (Prosedur Mal) (*ul*) Wilayah-Wilayah Persekutuan 1998.²³

Kemudian dirujuk sebagai “Akta 585” Kaedah-Kaedah Tatacara Mal (*ul*) Wilayah-Wilayah Persekutuan 2004 dan Arahan-arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia (*JKSM*). Berikut ini telah dirangka sebagai panduan dalam pengendalian prosedur *ul* oleh Jawatankuasa Kaedah-kaedah Mahkamah Syari'ah yang terdiri daripada Ketua Hakim Syar'i (bertindak sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kaedah-kaedah), seorang wakil Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, seorang wakil daripada Jabatan Pengacara Negara, seorang wakil Pengacara Syar'i dan

²² Seksyen 99 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

²³ Hammad Bin Mohamad Dahalan Dan Mohamad Azhan Bin Yahya, *Kedudukan Pegawai ul Di Mahkamah Syari'ah, (IRSYAD no 1090)*, (Malaysia: Kuis, 2016), hlm. 4083

bidang kuasa Jawatankuasa ini sebagai merangka kaedah *ul* yang diperincikan dalam seksyen 247(1)(c) Akta 585.²⁴

2.4.1 Konsep ul Dalam Perundangan Islam.

Islam mengharuskan umatnya menyelesaikan pertikaian kekeluargaan secara perundingan dan perdamaian. Terdapat beberapa kaedah penyelesaian pertikaian secara perundingan yang bisa digunakan dalam Islam. Misalnya kaedah hakam atau artibrase, mediasi, kombinasi mediasi dan artibrase, dan sebagainya. Walaupun pada dasarnya semua kaedah yang dinyatakan bertujuan menyelesaikan sesuatu pertikain secara kesepakatan bersama namun terdapat beberapa perbezaan dalam proses pelaksanaan dan jenis kasus yang diselesaikan.²⁵

Persidangan antara tempat terbaik dalam menyelesaikan pertikaian khususnya dalam masalah rumah tangga. Namun, persidangan boleh menjadi langkah terakhir dalam menegakkan keadilan. Dengan itu, pendekatan awal yang digunakan adalah perundingan antara pihak yang terlibat dalam pertikaian. Umumnya, kaedah rundingan atau permuafakatan secara damai bukanlah perkara baru dalam sistem pengadilan Islam. Perundingan damai telah dipraktikkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan menjadi Rasul dan terus dipraktikkan oleh generasi selanjutnya.

Proses persidangan melalui mahkamah bukanlah mudah. Ia melibatkan proses yang memerlukan masa yang panjang. Dalam proses ini, pihak-pihak yang terlibat

²⁴ Adzidah Yaakob , *Pengenalan dan Keberkesanan...*, hlm. 33-34

²⁵ *Ibid* hlm. 15

dalam pertikaian terpaksa bersikap defensif dan ofensif untuk mempertahankan hak masing-masing. Dalam keadaan ini, meskipun mahkamah berfungsi sebagai institusi yang membuat keputusan terhadap kasus-kasus yang bersengketa, namun tidak semestinya dicapai melalui pengadilan di depan hakim. Dengan kata lain, menghadiri persidangan mahkamah merupakan salah satu daripada mekanisme yang ada untuk menyelesaikan pertikaian. Selain itu, penyelesaian juga boleh dicapai berdasarkan kesepakatan bersama melalui *ul* tanpa melalui proses persidangan²⁶

2.4.2 Asas Objektif *ul* di Malaysia.

Pada dasarnya masyarakat Islam di Malaysia menggunakan Mahkamah Syari'ah sebagai rujukan terakhir dalam menyelesaikan kasus-kasus kekeluargaan. Persepsi masyarakat Islam di Malaysia bahwa setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarga perlu diselesaikan di Mahkamah Syari'ah dan perlu untuk melantik pegacara dalam penyelesaian sesuatu pertikaian. Hal ini adalah kurang tepat dengan prinsip keadilan karena Islam itu indah dan berlandaskan prinsip keadilan. Tidak semua permasalahan atau kasus yang didaftarkan perlu untuk membiayai pegacara. Pihak bertikai boleh mendapatkan pendapat di meja pendaftar untuk mendapat pandangan dan sebagainya. Seperti pada umumnya, untuk membiayai seorang pegacara memerlukan biaya yang tinggi dan tidak semua mampu untuk menyewa pegacara.²⁷

²⁶ Norita Kamaruddin, *Konsep Sulh...*, hlm. 26-27

²⁷ Hammad Mohamad Dahalan, *Pengurusan Sulh: Peranan, Pelaksanaan Dan Keberkesanan Oleh Pegawai Sulh, (IRMIC no 81)*, (Malaysia: Kuis, 2014), hlm. 565

Rumusan yang boleh diberikan mengenai definisi *ul* yang dipraktikkan di Mahkamah Syari'ah dari sudut undang-undang dan prakteknya adalah *ul* merupakan suatu kaedah penyelesaian secara damai dan ridha meridhai di mana pihak-pihak bertikai terhadap sesuatu kasus klaim atau permohonan menghadiri satu proses diskusi di dalam suatu majelis perundingan yang dipimpin secara resmi, yang diatur oleh Pegawai *ul* di Mahkamah Syari'ah. Penyelesaian yang dicapai oleh kedua-dua belah pihak akan dicatatkan di depan hakim dan dijadikan suatu perintah di mana keputusan bersifat mengikat.

2.4.3. Syarat-syarat Dalam *ul* .

Syarat-syarat *ul* yang berkaitan adalah kedua belah pihak yang berdamai (*al-Mu li*), ada yang berkaitan dengan pergantian sesuatu yang disengketakan (*al-Mu lah'laihi*) dan ada yang berkaitan dengan sesuatu yang disengketakan (*al-Mu lah'anhu*).²⁸

(1) Pihak-pihak yang berdamai

- (a) Orang yang layak dan sah mendermakan hartanya. Jika ia dibuat oleh orang yang tidak layak seperti orang gila atau kanak-kanak atau penjaga anak yatim atau nazir harta wakaf, maka *ul* nya tidak sah karena ia merupakan derma, sedangkan mereka tidak memilikinya.
- (b) *Mu li* yang mewakili anak dibawah umur harus orang yang memiliki hak *ta arruf* dalam hartanya, seperti ayah, kakek dan

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh...*, hlm. 242-243

pemegang wasiat. Hal tersebut dikarenakan *ul* merupakan suatu tindakan hukum yang berkaitan dengan harta sehingga diperlukan kewenangan untuk melakukannya.

(2) Sesuatu pengantian yang dijadikan *ul*

(a) Ia merupakan harta yang boleh dinilai dan dapat dibuat penyerahan atau sesuatu yang berharga. Tidak sah perdamaian dengan imbalan darah, bangkai, khamar dan barang lain yang tidak bernilai.

(b) Harta yang menjadi pengganti *ul* harus diketahui wujud dan bukan tidak jelas. Hal ini karena ketidakjelasan barang penggantian dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

(3) Hak yang dipertikaikan.

(a) Harus berupa hak manusia bukan hak Allah, baik dalam bentuk benda, utang maupun hak yang bukan benda dan utang, seperti hukuman *qi* dan *ta'zir*. Apabila hak yang menjadi objek *ul* adalah hak Allah, seperti larangan zina, *qa af*, dan *sirqah* maka perdamaian itu tidak sah .

(b) *Al-Mu lah'anhu* harus merupakan hak tetap dalam *al-Mu li* yang berkaitan dengan objek *ul* . Apabila hak tersebut belum merupakan hak yang tetap dalamnya maka perdamaian tersebut tidak sah.²⁹

Kesempurnaan syarat tersebut, menunjukkan bahwa *ul* telah disepakati kedua belah pihak ia bersifat mengikat dan tidak boleh diubah tanpa persetujuan dan

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh*, hlm. 244-245

tidak boleh didengar dakwaan yang mengklaim buat kali kedua. Namun demikian penyelesaian yang dibuat di Majelis *ul* boleh di bawa ke Mahkamah Syari'ah jika terdapat ketidaktulusan, penipuan, dan sebagainya yang mengakibatkan ketidakadilan kepada sesuatu pihak.

2.5. Akibat-akibat Hukum *ul* .

Akad perdamaian menimbulkan beberapa konsekuensi hukum sebagai berikut.

- (1) Putusnya gugatan dan perselisihan antara dua pihak yang bersengketa menurut hukum. Dengan demikian, tuntutan kedua belah pihak setelah itu tidak terjadi lagi.
- (2) Berkaitan dengan hak *syuf'ah* dalam syafi'. Apabila yang dituntut sebuah rumah, sedangkan penggantinya bukan rumah, melainkan uang atau lainnya, maka hak *syuf'ah* masih tetap dalam syafi', apabila jenis perdamaian iqrar atau pengakuan dari tergugat. Hal tersebut dikarenakan dalam kasus *ul* mengandung arti jual beli. Apabila jenis *ul* nya ingkar dari tergugat, maka tidak ada hak *syuf'ah* karena di sini tidak terkandung arti jual beli apabila dinisbahkan kepada tergugat.
- (3) Adanya hak pengembalian barang karena cacat (aib).
- (4) Hak pengembalian barang karena *khiy ru'yah* yaitu hak memilih antara melanjutkan dan tidak dengan melihat barang yang ada.
- (5) *Al-Mu li* tidak boleh melakukan *ta arruf* terhadap penggantian *ul* sebelum penggantian (*badal*) *ul* tersebut diterima ditangannya, apabila

bendanya benda bergerak (*manq l*). Dan apabila bendanya tetap (*'aqar*), menurut Imam Abu anifah dan Abu Yusuf, *ta arruf* boleh dilakukan. Sedangkan menurut Muhammad bin asan, *ta arruf* tidak boleh dilakukan sebelum barangnya diterima di tangan *mu li* .

- (6) Orang yang menjadi wakil dalam *ul* terikat untuk menerima pengganti (*badal*) *ul* dari tergugat, apabila *ul* nya bersifat *mu'awa ah*. Apabila *ul* nya bersifat penyerahan barang, seperti tagihan satu juta rupiah, tetapi berdamai untuk membayar lima ratus ribu rupiah maka dalam hal ini wakil terikat dengan pengganti *ul* apabila ia memberikan jaminan untuk sisanya. Akan tetapi, apabila ia tidak menjaminnya maka ia tidak terikat karena dalam kasus ini ia sebagai utusan.³⁰

2.5.1 Hal-hal Yang Membatalkan Akad *ul* .

Perdamaian dapat dibatalkan karena ada beberapa hal yang menghalangi akad *ul* , bahwa pada dasarnya perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan ia telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Pengadilan Tingkat terakhir, dengan perkataan lain tidak dapat diajukan gugatan terhadap perkara yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun demikian perdamaian tersebut masih ada kemungkinan untuk dibatalkan.³¹ Adapun hal-hal yang membatalkan akad *ul* , adalah sebagai berikut.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 491-492

³¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 32

- (1) *Al-'Iq lah*³² dalam selain *Sulh* atas *qi* . Apabila salah satu pihak mengusulkan pembatalan akad dan diterima (disepakati) oleh pihak lainnya maka akad perdamaian menjadi *fasakh* (batal), karena di sini terkandung makna tukar-menukar barang dengan barang, yang memungkinkan untuk di *fasakh* seperti hal jual beli.
- (2) Pengembalian barang karena *khiy ru'aib* (cacat) atau atas dasar *khiy ru'yah*. Hal ini karena pengembalian barang berarti membatalkan akad.
- (3) Meninggalnya salah satu pihak dalam *ul* atas manfaat sebelum waktunya habis. Hal tersebut dikarenakan *ul* atas manfaat mengandung arti atau memiliki kedudukan akad *'ij rah*. Sedangkan akad *'ij rah* menjadi batal karena salah satu pihak yang melakukan akad *'ij rah* meninggal dunia.³³

³² Salah satu pihak yang melakukan akad meminta dan menginginkan untuk membatalkan akad, lalu pihak yang lain menrima dan meluluskan keinginannya tersebut. Atau dengan kata lain, pembatalan akad atas keinginan salah satu pihak dan distujui oleh pihak yang lain.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 493

BAB TIGA

EFEKTIVITAS MAJELIS UL DALAM MEMEDIASI PERTIKAIAN KELUARGA DI MAHKAMAH SYARI'AH

3.1. Gambaran Umum Majelis ul Mahkamah Syari'ah Selangor.

Pada tahun 1900, Majelis Musyawarah Provinsi telah memutuskan Undang-Undang Pendaftaran Nikah Kawin dan Cerai Orang-Orang Islam 1900 (*Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment 1900*) yaitu undang-undang berhubungan dengan nikah kawin dan cerai orang-orang Islam di Provinsi Selangor.

Pada tahun 1900 juga, jabatan *qa hi* mula diperluas ke kabupaten-kabupaten dalam provinsi Selangor dan pada tahun 1922 tiap-tiap kabupaten ada *qa hinya* masing-masing yaitu di kabupaten Klang, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Ulu Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kuala Kubu dan Rawang.

Pada tahun 1948 struktur Jabatan Agama Islam Selangor (*JAIS*) telah dibentuk, dengan itu usaha merencanakan dan menyusun undang-undang telah dilakukan dan menghasilkan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 tahun 1952 dengan nama Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 tahun 1952 dan mula diberlakukan pada 5 Desember tahun 1952.

Dengan adanya undang-undang ini maka undang-undang terdahulu tidak berlaku lagi. Sehingga hari ini undang-undang ini telah mengalami pergantian sebanyak 7 kali yaitu pada tahun 1969, 1960, 1961, 1962, 1966, 1972 dan pada 1979.

Pergantian ini dibuat berkaitan dengan pembaruan pengurusan awal Islam di provinsi Selangor.

Pada tahun 1984 Undang-Undang Keluarga Islam Selangor No. 4 tahun 1984 telah diterbitkan dan diberlaku pada 23 Januari 1989 di seluruh provinsi Selangor. Pelaksanaan Undang-undang ini telah menggantikan bagian ke 6 dan 7 seksyen 155, 156, 158, 160 dan 178 perenggan (n) Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 tahun 1952.

Pada tahun 1989 Enakmen Perundangan Islam Selangor No. 2 tahun 1989 telah diterbitkan. Berdasarkan enakmen ini, Mahkamah Syari'ah Selangor didirikan secara resmi dan berpisah dari struktur Jabatan Agama Islam Selangor (*JAIS*). Pada tahun 1991, Enakmen Qanun Prosedur Jinayah Syari'ah Selangor No. 6 tahun 1991 dan Enakmen Qanun Prosedur Mal Syari'ah Selangor No. 7 tahun 1991 telah diterbitkan dan mula berlaku pada 1 September 1991. Mulai tanggal itu Mahkamah Syari'ah Selangor telah berpisah secara resminya dari *JAIS*.

Pada tahun 2003 nama Mahkamah Syari'ah Selangor telah ditukar kepada Jabatan Kehakiman Syari'ah Negeri Selangor (*JAKESS*) selaras dengan perkembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan Mahkamah Syari'ah di Provinsi Selangor adalah di bawah pasal 55(1), 55(2), 55(3) dan 55(4) dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Provinsi Selangor) 2003.¹

¹ [www.jakess.gov.my](http://jakess.gov.my), Diakses melalui situs <http://jakess.gov.my/info-jabatan/maklumat-korporat/latar-belakang/>. Pada tanggal 11 Oktober 2018

Pusat pengurusan Mahkamah Syari'ah Provinsi Selangor beroperasi di Tingkat 5 & 6, dikenali sebagai kantor Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Mulai tanggal 2 Oktober tahun 2003, pengurusan pentadbiran Mahkamah Syari'ah Provinsi Selangor telah ditukar namanya dan dikenali sebagai Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor (*JAKESS*). Sejak tanggal 18 Julai 2011, *JAKESS* telah berpindah dan memulai operasinya ke kantor yang baru di kantor Mahkamah Syari'ah Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid, seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor.

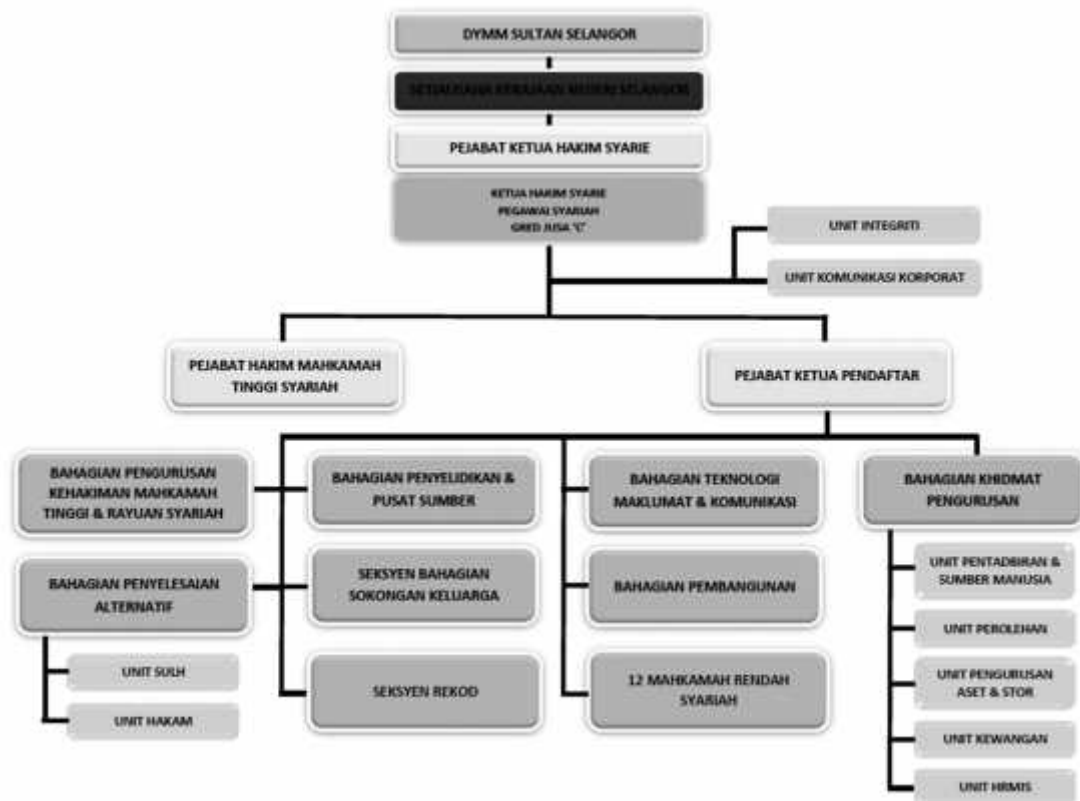
Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor (*JAKESS*) bertanggungjawab menguruskan perjalanan kasus mal (keluarga), kasus jinayah (pidana), kasus rayuan (banding) serta pembagian *far 'i* di semua peringkat mahkamah. *JAKESS* mempunyai 3 Struktur Organisasi Mahkamah Syari'ah yaitu Mahkamah Rayuan (banding) Syari'ah Selangor dan Mahkamah Tinggi Syari'ah Selangor yang beroperasi di kantor Mahkamah Syari'ah Sultan Idris Shah, Shah Alam. Manakala Mahkamah Rendah Syari'ah Selangor teletak di 10 kabupaten di provinsi Selangor.²

Selain itu, Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor mempunyai visi dan misi untuk memastikan pelaksanaan yang dijalankan mencapai tujuan. Visi Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor pula adalah: “*JAKESS* sebagai Institusi Kehakiman Syari'ah yang terunggul di Malaysia pada tahun 2020 yang berteraskan kepada keadilan Islam”. Misi Jabatan Kehakiman Syari'ah Provinsi Selangor adalah

² Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Suhail Bin Mohd Najid, Pegawai *ul* Mahkamah Syari'ah Selangor, Komunikasi Personal melalui email pada tanggal 14 September 2018

“Melaksanakan pengadilan, pengurusan Mahkamah dan perkhidmatan sokongan secara profesional, berkesan dan sistematik berasaskan peruntukan Undang-Undang Islam yang seragam di Selangor”³

Untuk lebih memudahkan dalam melakukan aktivitas kerja, maka dibentuklah struktur organisasi di bawah naungan Mahkamah Syari’ah Provinsi Selangor. Struktur ini didirikan untuk memudahkan kerja di Mahkamah Syari’ah berjalan dengan sistematika, tulus dan tiada kelewatan dalam pelaksanaan kerja. sebagaimana berikut:



Sumber dari: Jabatan Kehakiman Syari’ah Selangor

³ Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, *Pelan Strategik 2015-2020 (Vol. 2)*, (Malaysia: JAKESS, 2015), hlm. 13

Pada awalnya pelaksanaan *ul* di Selangor dijalankan secara tidak resmi di hadapan petugas pendaftaran di mahkamah atas inisiatif hakim apabila hakim mendapati pihak-pihak yang bersengketa ada jalan untuk penyelesaian secara *ul*. Keadaan ini perlu karena hakim terbebani dengan jumlah kasus yang banyak. Penyelesaian secara *ul* dapat membantu hakim mengurangi kasus-kasus yang tertunda.

Bermula tanggal 1 Mei 2002, Mahkamah Syari'ah Selangor telah melaksanakan secara resmi proses *ul* sebagaimana yang terkandung di dalam Kaedah-Kaedah Mal *ul* Selangor tahun 2001 berdasarkan peruntukan Seksyen 87 dan 88 Enakmen Qanun Prosedur Mal Syari'ah Selangor 1991, tetapi telah diberi 'gaya baru' bagi menjadikan peranan Mahkamah Syari'ah Selangor lebih efektif di samping membantu pihak-pihak yang bertikai di mahkamah menyelesaikan pertikaian mereka tanpa perlu melalui persidangan. Setelah kaedah *ul* diwartakan, kerajaan negeri telah meluluskan perantikan Pegawai Syari'ah Gred L3 (sekarang LS41) bertaraf kontrak sebanyak 11 orang untuk bertugas sebagai pegawai *ul* di 10 kabupaten Mahkamah Rendah Syari'ah Selangor dan seorang di Mahkamah Tinggi Syari'ah Shah Alam.⁴

Kelayakan minimum pegawai *ul* adalah Ijazah Sarjana Muda Syariah (S1) dan Diploma Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam atau Diploma yang setaraf dengannya (D3), kelayakan ini adalah sama dengan kelayakan seseorang Hakim

⁴ Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Syafiq Bin Ibrahim, Pegawai *ul* Mahkamah Syari'ah Selangor, pada tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor

Mahkamah Rendah Syari'ah. Semua pegawai ini telah dilantik dan mula bertugas sejak tanggal 14 April 2002. Pegawai *ul* Selangor terdiri dari 7 orang pegawai lelaki dan 3 orang perempuan. Sehingga sampai saat ini Skim Perjawatan Pegawai *ul* telah berkembang menjadi 13 orang pegawai yang terdiri dari 8 orang lelaki dan 5 orang perempuan yaitu 3 orang pegawai bertugas di Mahkamah Tinggi dan selainnya di Mahkamah Rendah Syari'ah di kabupaten-kabupaten provinsi Selangor. Antara anggota pegawai *ul* yang bertugas di Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor adalah Mohd Suhail bin Mohd Najid dan Mohd Syafiq bin Ibrahim.⁵

3.2. Dasar Hukum dan Kewenangan Majelis *ul* di Mahkamah Syari'ah Selangor.

Ibrahim Lembut Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia. Dalam pernyataan yang dikeluarkan arahan amalan No 1 tahun 2010. Kasus-kasus *ul* yang boleh diselesaikan perlu dirujuk ke Majelis *ul* pada peringkat pendaftaran di Mahkamah Syari'ah. Antara kasus yang berkaitan dengan *ul* adalah gugatan karena melanggar janji dalam pertunangan, perkawinan dan juga gugatan-gugatan konsekuensi dari suatu perceraian contohnya *mut'ah*, nafkah *'iddah*, harta bersama, nafkah anak. Majelis *ul* mempunyai hak kewenangan untuk mencari jalan solusi dalam menyelesaikan hak *a nah* dengan melihat kepentingan anak tersebut selama dalam pernikahan maupun sudah perceraian.⁶

⁵ *Ibid*, tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor

⁶ Ibrahim Lembut, Arahan Amalan No.1 Tahun 2010, Penentuan Kasus Yang Perlu Dirujuk Ke Majelis Sulh Pada Peringkat Pendaftaran Kasus, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, 28 Julai 2010, hal. 3-4.

Pelaksanaan Majelis *ul* di Mahkamah Syari'ah Selangor adalah berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Provinsi Selangor) 1/2003, Enakmen Qanun Prosedur Mal Syariah (Provinsi Selangor) No. 7/1991, dan Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syari'ah (Provinsi Selangor) No.4/2003, (KTMSS01 belum diperbaharui mengikut Enakmen 2003), Pasal 99 Undang-undang Tatacara Mal Mahkamah Syari'ah (Selangor) 2003,⁷ Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Provinsi Selangor) 2/2003, Manual Kerja *ul* JKSM dan Pekeliling Ketua Hakim MSS 1/2002 (Kod Etika Pegawai *ul* dan Manual Kerja *ul* MSS), Pekeliling Ketua Hakim MSS 9/2002 [Bidang kuasa Pegawai *ul* (Hakim)], Arahan Amalan JKSM 3/2002 (Pemakaian *ul*), Arahan Amalan JKSM 7/2002 (Pola menyimpan dan Melupakan Catatan Pegawai *ul*) dan Arahan Amalan JKSM 8/2002 (Prosedur Penyerahan Notis *ul*).⁸

Prosedur pelaksanaan di Majelis *ul* di Mahkamah Syari'ah Selangor berdasarkan Manual Kerja *ul* . Manual Kerja *ul* yang dilaksanakan bertujuan menjelaskan pola yang diterapkan dalam proses kerja yang perlu dijalani di dalam Majelis *ul* dan Kod Etika Pegawai *ul* di Mahkamah Syari'ah Provinsi Selangor. Sekiranya kedua pihak yang bertikai merasakan perlu menjalani proses *ul* boleh memohon untuk berbuat demikian demi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa mengikut hukum syarak walaupun sedang berada dalam proses di mahkamah.

⁷ Enakmen 4 Tahun 2003, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 Bahagian Xiii - Penyelesaian, Penarikan Balik dan Pemberhentian

⁸ Sheikh Ghazali Bin Hj. Ab. Rahman, Arahan Amalan No. 8 Tahun 2002, Tempoh Masa Pengemukaan Nota Perbicaraan Bagi Maksud Rayuan, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, 23 ogos 2002.

Tatacara Mal *ul* juga turut memperuntukkan dan memberi kuasa kepada Jawatankuasa Mahkamah Syari'ah membuat peruntukan mengenai tatacara dan amalan kantor pendaftaran Mahkamah.⁹

Adapun prosedur dan proses kerja *ul* dalam menyelesaikan pertikaian keluarga dalam mediasi di Majelis *ul* Mahkamah Syari'ah Selangor diilustrasikan dalam skema dibawah ini:

Tabel 1: Skema Proses Kerja *ul*

JABATAN	PROSES KERJA
Pendaftaran	
Proses	
Panitera atau Wakil Panitera	-Menerima berkas kasus dari wakil panitera -Tetapkan tanggal sebutan atau <i>ul</i> kepada para pihak
Pegawai <i>ul</i>	-Majelis <i>ul</i> dijalankan di hadapan Pegawai <i>ul</i> -Jika tiada persetujuan untuk melaksanakan <i>ul</i> tanggal persidangan harus ditetapkan
Wakil Panitera	-Jika ada kesepakatan keseluruhannya atau sebagainya, harus dicatat dan mengajukan berkas kepada hakim untuk dibicarakan
Hakim	-Melaksanakan penghakiman dan Perintah Kesepakatan (Tugas kehakiman dalam menindak lanjuti proses)
Proses Pngeluaran Perintah	
Panitera atau Wakil Panitera	-Menyedia dan memeriksa draf perintah dari para pihak
Hakim	-Tandatangani dan meterai perintah
Panitera atau Wakil Panitera	- Penyampai perintah kepada para pihak

⁹ Hammad Bin Mohamad Dahalan, *Kedudukan Pegawai ul ...*, hlm. 5083

Sumber dari : Pegawai *ul* Mahkamah Syari'ah Selangor Tahun 2018

3.3. Pola yang di Terapkan Majelis *ul* dalam Mediasi Pertikaian Keluarga Mahkamah Syari'ah Selangor.

Pola yang di terapkan Majelis *ul* dalam menyelesaikan mediasi pertikaian keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Syari'ah di setiap negeri masing-masing dan juga mereka diberikan latihan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sebagai pegawai *ul*.¹⁰

3.3.1. Pola Majelis *ul* di Mahkamah Syariah Selangor.

Pola yang diterapkan dalam menyelesaikan pertikaian keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor berdasarkan Manual Kerja *ul* yang dikeluarkan dalam Pekeliling Ketua Hakim Mahkamah Syari'ah Selangor, isi kandungan setiap proses berdasarkan uraian didalam Manual tersebut:

1) Kenyataan Awal Pegawai *ul*

Memperkenalkan diri, membaca *Al-F ti ah* dan menjelaskan undang-undang yang dipakai, tujuan *ul*, peraturan yang patut dipatuhi, serta proses yang akan dilalui.

2) Pemaparan Awal Pihak Yang Bertikai

Penggugat (plaintif) memaparkan terlebih dahulu, tergugat (defendan) menjelaskan pertikaiannya, Pegawai *ul* membuat peta konflik, meneliti dan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Syafiq Bin Ibrahim, Pegawai *ul* Mahakamah Syari'ah Selangor, pada tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor

mengurus informasi yang diberi untuk menentukan isu, kedudukan, dan kepentingan pihak yang bertikai.

3) Perundingan Bersama Pihak-pihak yang terlibat

Menyampaikan pendapat, penilaian dari pegawai *ul*, apabila persetujuan diperoleh maka pegawai boleh terus membuat draf perjanjian penyelesaian tanpa perlu mengikuti proses selanjutnya.

4) Pertemuan Sebelah Pihak (kaukus)

Penggugat (plaintif) dipanggil dahulu diikuti tergugat (defendan), pegawai *ul* menyeimbangkan keadaan, melihat kelemahan setiap pihak, *brain storming*, pegawai adil dalam masa pertemuan bersama pihak.

5) Perundingan Bersama

Setelah pertemuan sebelah pihak (kaukus) telah diselesaikan, maka proses selanjutnya pihak yang bertikai diteruskan dengan perundingan bersama. Jika didapati pihak yang terlibat tidak ada titik temu, pihak yang terlibat boleh mengulangi proses perbincangan. Hal ini untuk menghindari proses selanjutnya (proses persidangan penghakiman).

6) Penghakiman Berasaskan Persetujuan

Draf perjanjian penyelesaian yang telah dipersetujui oleh pihak bertikai hendaklah ditandatangani di hadapan pegawai *ul*. Draf itu kemudiannya akan diserahkan oleh pegawai *ul* kepada pihak mahkamah untuk dicatat sebagai penghakiman berasaskan persetujuan.

7) Kasus Diserahkan Kembali

Persetujuan yang tidak disepakati selebihnya (syarat yang tidak dipersetujui) diserahkan ke proses persidangan.¹¹

Pusat Mediasi Malaysia membantu klien dengan menyediakan jadwal proses dan penerangan ringkas sebelum mediasi dimulai. Sebagaimana digariskan dalam Mediasi Kit, proses mediasi mengikuti urutan seperti berikut:

1. Proses Pra Mediasi : Pihak-pihak sengketa menandatangani persetujuan syarat-syarat menjalani mediasi.
2. Pengenalan : Pengenalan kepada Mediasi.
3. Pemaparan awal dari Mediator : Penetapan peraturan perundingan dari mediator. Mediator diinformasikan tentang beberapa fakta mengenai pertikaian.
4. Sesi bersama : Pihak yang bersengketa dibenarkan untuk menyatakan klaim dengan kehadiran pihak satu lagi.
5. Perjumpaan sebelah pihak : Sekiranya perlu salah satu pihak boleh bersama mediator secara sepihak bagi menyatakan emosi dan bercakap dengan bebas.

¹¹ Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Suhail Bin Mohd Najid, Pegawai ul Mahkamah Syari'ah Selangor, Komunikasi Personal melalui email pada tanggal 24 April 2018

6. Perjanjian persetujuan : Pihak-pihak yang bersengketa menandatangani perjanjian penyelesaian disaksikan oleh mediator. Pihak-pihak yang bersengketa boleh mendaftarkan gugatan kasus di mahkamah sekiranya tidak ada titik temu dalam mediasi. Pegacara kedua-dua belah pihak atau pihak mediator boleh menyediakan perjanjian sekiranya ada penyelesaian.¹²

Tidak terdapat banyak perbezaan antara proses *ul* dan mediasi, ini adalah kerana tujuan utama proses dilakukan adalah untuk mencapai kata kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, bahwa proses *ul* sedikit banyak diadaptasi daripada mediasi dengan sebagian penyesuaian, mengadaptasikan ini untuk menonjolkan identitas Islam misalnya bacaan doa pada permulaan dan unsur litigasi dengan mendukung pada akhir proses sekiranya berhasil.

3.3.2. Latihan Pegawai *ul* .

Hasil inisiatif Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia. Pegawai *ul* dilatih dan diberi akreditasi oleh *Accord Group* setelah mengikuti kursus selama 40 jam secara bertingkat. Sejak tahun 2006 kantor yang terletak di Sydney Australia ini berpengalaman dalam melaksanakan pelatihan mediasi di Hong Kong, Singapura, Philipina, New Zealand dan Australia.

Dalam konteks Mahkamah Syari'ah Selangor, latihan berbentuk konseling turut disertai oleh pegawai *ul* yang dianjurkan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan

¹² Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Suhail Bin Mohd Najid, Pegawai *ul* Mahakamah Syari'ah Selangor, Komunikasi Personal melalui email pada tanggal 14 September 2018

Awam (*JPA*) dan pihak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (*JKSM*). Hasil wawancara dengan pegawai *ul*, Tuan Muhammad Suhail menyatakan kemampuan konseling banyak membantu pegawai mengendalikan klien *ul* yang bermasalah. Mediator yang terdaftar di Pusat Mediasi Malaysia ada yang mendapat latihan dari perusahaan yang sama. Ini menjadikan latihan yang dijalani dan akreditasi yang diperoleh pegawai *ul* adalah setaraf dengan mediator yang lain. Antara keahlian yang diberi penekanan oleh *Accord Group* dalam kursus pengurusan mediasi adalah:

- 1) *Negosiasi*–Kemampuan berunding, tujuan perundingan selalunya untuk menulis persetujuan.
- 2) *Mendegar*–*Mendengar* dan memahami, menunjukkan perhatian dan simpati. Bahasa tubuh juga sebagian dari mendengar. Boleh mengetahui niat tersembunyi jika pertanyaan yang tepat ditujukan kepada pihak bertikai hasil dari pemahaman mediator terhadap sesuatu isu.
- 3) *Ringkasan*–*Kesimpulan* yang dibuat oleh mediator untuk memberi pemahaman pihak-pihak situasi sebenar. Dibuat setiap kali pihak selesai memberi kenyataan, kesimpulan juga boleh membantu pihak melihat isu dengan lebih besar.
- 4) *Kesamaan*–Kemampuan mencari titik persamaan antara pihak-pihak yang bersengketa, perlu mengetahui bagi mengelakkan isu dan fakta yang tidak berkaitan dimasukkan dalam perundingan.

- 5) Mengatur Susunan Perjalanan Perundingan–Mengatur perjalanan proses majelis untuk ditulis, agar perhatian pihak-pihak tidak keluar dari tujuan yang dikehendaki, perjalanan majelis harus adil yaitu tidak berpihak kepada salah satu pihak.
- 6) Mengubah Sudut Pandang–Kemampuan mediator dalam mengeluarkan ungkapan positif atau netral membantu pihak-pihak membina persepsi yang baik kepada pihak yang lain.
- 7) Mengidentifikasi Tujuan dan Kebutuhan–Kemampuan mengemukakan persoalan untuk membantu pihak mengenai kebutuhan dan kemauan dari pihak yang bersengketa. Keutamaan harus diberikan kepada kebutuhan dan objektif bukan sekadar hak dan kemauan
- 8) Membangkitkan Keraguan–Mencipta keraguan dengan pertanyaan tentang kedudukan pihak sekiranya pertikaian tidak dapat diselesaikan. Dalam banyak situasi pihak yang bertikai susah untuk berfikir secara rasional. Dalam pertanyaan itu menggunakan perkataan ‘jika’, ‘kalau’, ‘bagaimana sekiranya’ dan sebagainya.
- 9) Diplomatik–Kemampuan diplomasi, menggunakan kembali perkataan positif yang diucapkan oleh pihak yang bertikai, menyentuh secara tidak langsung keegoan pihak.
- 10) Intervensi–Memotong percakapan, kemampuan terbesar dalam mediasi adalah mengetahui masa yang sesuai untuk memotong percakapan pihak

yang bersengketa, terlalu banyak atau tidak memotong percakapan langsung memberi dampak kepada persepsi pihak-pihak yang sengketa terhadap mediator.

- 11) Mengemukakan Pertanyaan–Kemampuan mengemukakan pertanyaan, membantu pihak-pihak menuju kepada penyelesaian dengan meminta kerjasama pihak yang bersengketa dan pertanyaan yang sesuai, ini lebih sesuai daripada mengeluarkan kenyataan.
- 12) Memecah kebuntuan–Memecah kebuntuan dengan meninggalkan isu yang susah dan meneruskan isu yang mudah.¹³

Pengalaman mengendalikan latihan oleh *Accord Group* di berbagai negara secara tidak langsung mengangkat kewibawaan pegawai *ul* yang sukses mendapat akreditasi dari perusahaan tersebut. Malah ia turut meningkatkan imej Mahkamah Syari'ah karena mempunyai pegawai yang dilatih oleh perusahaan bertaraf internasional. Setiap pegawai *ul* harus berjaya mendapatkan sekurang-kurangnya setifikat akreditasi mediasi dari *Accord Group* untuk mengekalkan mutu serta kualitas Majelis *ul* .

3.4. Efektivitas Majelis *ul* dalam Memediasi Pertikaian Keluarga Mahkamah Syari'ah Selangor.

Pada umumnya, pola penyelesaian yang diterapkan Majelis *ul* telah menunjukkan dampak yang positif. Pada tahun 2002 pola ini berhasil mengurangkan

¹³ Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Suhail Bin Mohd Najid, Pegawai *ul* Mahakamah Syari'ah Selangor, Komunikasi Personal melalui email pada tanggal 14 September 2018

hampir 65% kasus di Mahkamah Syari'ah Selangor sejak Majelis *ul* dilaksanakan pada tahun 2001. Hasil wawancara bersama pegawai *ul* Tuan Syafiq dan merupakan Hakim Mahkamah Syari'ah Selangor menyatakan faktor utama kasus berhasil diselesaikan melalui pola yang diterapkan *ul* banyak bergantung kepada sikap dan keterbukaan pihak-pihak yang terlibat di dalam Majelis *ul*.¹⁴ Berikut di antara faktor-faktor tersebut:

- 1) Kedua belah pihak yang bertikai mempunyai keinginan untuk menyelesaikan klaim dengan secara damai
- 2) Kedua pihak yang bertikai bersedia memberi kerjasama dan bersedia bernegosiasi dengan tulus ikhlas, bukannya beremosional.
- 3) Kedua belah pihak yang bersengketa sadar bahwa penyelesaian adalah untuk kepentingan masa depan.
- 4) Kedua belah pihak yang bersengketa sadar akan pro dan kontra jika kasus dibawa ke proses persidangan.

Pola yang diterapkan Majelis *ul* ini juga menarik perhatian pihak-pihak untuk menghadiri Majelis *ul* berdasarkan penerapannya yaitu pola ini menjanjikan penyelesaian sengketa secara konsep situasi sama-sama untung ("*win-win situation*") di antara pihak sengketa dan tidak ada pihak yang kalah. Pola *ul* ini menekankan asas kerahasiaan kedua belah pihak yang bersengketa di mana hal yang dibahas di

¹⁴ Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Syafiq Bin Ibrahim, Pegawai *ul* Mahkamah Syari'ah Selangor, pada tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor

Majelis *ul* bersifat rahasia hanya pegawai *ul* yang mengetahuinya, itu tidak akan ditemukan dalam persidangan di Mahkamah Syari'ah.¹⁵

Tabel 2 : Statistik Keseluruhan Kasus *ul* .

No	Tahun	Daftar Kasus Majelis <i>ul</i>	Kasus ditangani Majelis <i>ul</i>			Persen Kasus Selesai (%)	Persen Kasus Tidak Selesai (%)	Persen Kasus di tangani (%)
			Kasus berhasil di Majelis <i>ul</i>	Kasus tidak Selesai Tahap Persidangan	Kasus Tidak di Hadiri			
1	2013	2491	1048	564	666	65%	35%	91%
2	2014	2534	1045	484	758	68%	32%	90%
3	2015	2598	1144	463	631	71%	29%	86%
4	2016	2972	1325	487	789	73%	27%	88%
5	2017	3367	1363	564	1024	71%	29%	88%
6	Jumlah	13962	5925	2562	3868	69%	31%	88%

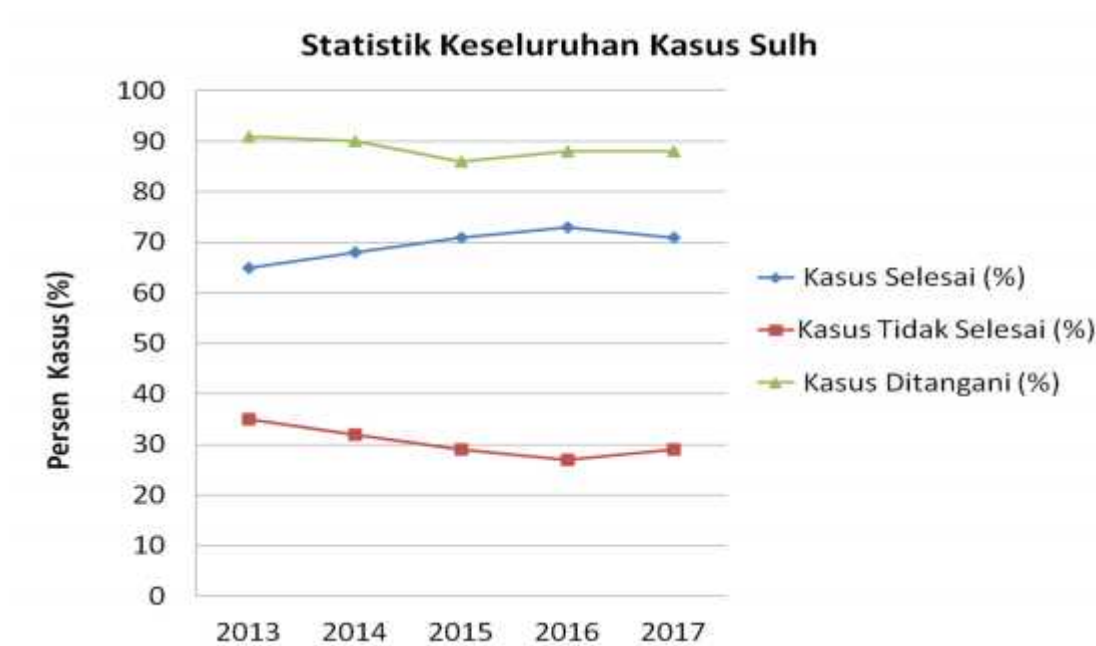
Sumber dari : Pegawai *ul* Mahkamah Syari'ah Selangor Tahun 2018

Pada tahun 2013 hingga 2017, telah dicatat sebanyak 13962 kasus yang meliputi kasus klaim atau permohonan. Seperti kasus melanggar janji untuk menikah atau pertunangan, klaim yang muncul dari suatu perceraian seperti nafkah iddah, harta bersama, hak asuh anak (*a nah*), dan lain-lain. Dari angka kasus tersebut, pihak Majelis *ul* berhasil menyelesaikan sebanyak 5925 kasus, 2562 kasus tidak

¹⁵ Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Syafiq Bin Ibrahim, Pegawai *ul* Mahakamah Syari'ah Selangor, pada tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor

selesai, dan 3868 kasus para pihak tidak menghadiri. Kasus yang paling banyak didaftarkan di Majelis *ul* di Selangor berkaitan nafkah anak.¹⁶

Diagram 1 : Grafik Statistik Keseluruhan Kasus *ul*



Sumber dari : Pegawai *ul* Mahkamah Syari'ah Selangor Tahun 2018

Berdasarkan grafik statistik yang penulis buat di diagram 1 dapat dilihat persentase kasus selesai dari tahun 2013 hingga 2017 semakin meningkat dari tahun ke tahun dan tidak turun dari 65% menunjukkan adanya efektivitas dalam mengurangi peningkatan kasus di Mahkamah Syariah Selangor selama 5 tahun dan menunjukkan pola yang diterapkan memberi kesuksesan dalam menyelesaikan kasus di Majelis *ul* . Persentase Kasus tidak selesai di Majelis *ul* akan dianggap gagal apabila salah satu pihak tidak ada kesepakatan dalam menyelesaikan pertikaian di

¹⁶ Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Syafiq Bin Ibrahim, Pegawai *ul* Mahkamah Syari'ah Selangor, pada tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor

Majelis *ul* dan pihak bertikai tidak menghadiri ke Majelis *ul* untuk menyelesaikan konflik.

Menurut Tuan Suhail dan merupakan pegawai *ul* , pihak yang gagal menghadiri ke Majelis *ul* pada tanggal ditetapkan, maka perlu menginformasikan hal tersebut kepada pihak Mahkamah Syari'ah dengan berdasarkan alasan yang jelas. Apabila tidak hadir, dan tanpa alasan yang jelas ia merupakan satu penghinaan kepada pihak mahkamah. Tindakan pihak yang gagal hadir ke Majelis *ul* dengan sengaja tanpa alasan akan dikenakan denda sebanyak Rp 10.000000 juta rupiah (RM 3.000 ribu ringgit) dan sekiranya gagal membayar denda akan dikenakan hukuman penjara.¹⁷

Menurut pegawai *ul* Tuan Syafiq, kasus-kasus yang rumit tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak juga mempunyai probabilitas yang tinggi untuk diselesaikan dan akan melalui proses persidangan di Mahkamah Syari'ah. Akan tetapi Majelis *ul* di provinsi Selangor pegawai *ul* yang dilantik mempunyai wewenang menjadi hakim apabila kegagalan berlaku dalam proses *ul* . Wewenang ini tidak berlaku di provinsi lain selain dari Selangor.¹⁸

Wewenang yang diberikan pegawai *ul* yang di tunjuk menjadi hakim atas kebijaksanaan Ketua Hakim Mahkamah Syari'ah Selangor karena Selangor merupakan provinsi tertinggi kasus pertikaian keluarga di Malaysia. Kegagalan pola

¹⁷ Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Suhail Bin Mohd Najid, Pegawai *ul* Mahakamah Syari'ah Selangor, Komunikasi Personal melalui email pada tanggal 14 September 2018

¹⁸. Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Syafiq Bin Ibrahim, Pegawai *ul* Mahakamah Syari'ah Selangor, pada tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor

yang diterapkan *ul* ini akan mengakibatkan keterlambatan penyelesaian dan menambah angka kasus di mahkamah yang semakin hari semakin bertambah. Kesuksesan suatu Majelis *ul* banyak bergantung kepada pola yang diterapkan dan faktor pihak yang bertikai.¹⁹

Oleh karena itu, setiap pihak yang menghadiri ke Majelis *ul* haruslah mencari penyelesaian dan kesepakatan. Pihak yang bertikai haruslah berfikiran terbuka dalam menghadiri proses *ul* karena dari sifat keterbukaan pihak bertikai penyelesaian dan kesepakatan dapat dicapai. Setiap pihak yang menghadiri ke Majelis *ul* tidak melakukan sesuatu perkara diluar jangkauan mengakibatkan perkara buruk berlaku. Untuk menghindari dari melakukan perkara-perkara yang tidak baik, pihak bertikai haruslah sadar tentang proses penyelesaian yang dilalui di Majelis *ul* .

3.5. Tahap Kepuasan Pihak Bertikai yang Menghadiri Majelis *ul* Mahkamah Syari'ah Selangor.

Satu kajian telah dilakukan di Mahkamah Syari'ah Selangor untuk mengetahui tahap kepuasan masyarakat yang menghadiri pertikain keluarga di Majelis *ul* yang terdapat di dalam sistem perundangan Mahkamah Syari'ah.

. a) Demografi Responden

Demografi bagi setiap responden bagi survei ini di ambil berdasarkan usia, status perkawinan, status perkerjaan dan jenis kelamin. Tujuan survei demografi

¹⁹ Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Syafiq Bin Ibrahim, Pegawai *ul* Mahakamah Syari'ah Selangor, pada tanggal 16 Agustus 2018, di JAKESS Selangor

responden adalah untuk mengetahui latar belakang responden secara umum untuk membantu kajian yang dijalankan.

Bagi latar belakang mengikut umur pihak responden sebanyak 25% dikalangan responden ada yang berumur 18 hingga 25 Tahun. 35% dari jumlah responden adalah berusia 26 hingga 30. 20% responden yang berumur 31 hingga 35 tahun sedangkan 20% responden berumur 36 hingga 40 tahun. Tidak ada responden yang berusia 41 tahun ke atas.

Bagi latar belakang mengikut status perkawinan, sebanyak 10% responden berkawin dan 90% dari responden telah berkawin dan bercerai. Untuk status pekerjaan juga, di dalam survei ini telah dibagi kepada pegawai kerajaan, pegawai swasta, bekerja sendiri dan tidak bekerja. Hasil kajian didapati bahawa sebanyak 30% responden pegawai kerajaan, 35% merupakan responden pegawai swasta, 25% responden kerja sendiri dan 10% lainnya merupakan responden tidak bekerja. Untuk latar belakang yang mengikut jenis kelamin sebanyak 50% responden adalah di kalangan laki-laki, 50% responden adalah perempuan.

b) Hasil Kajian.

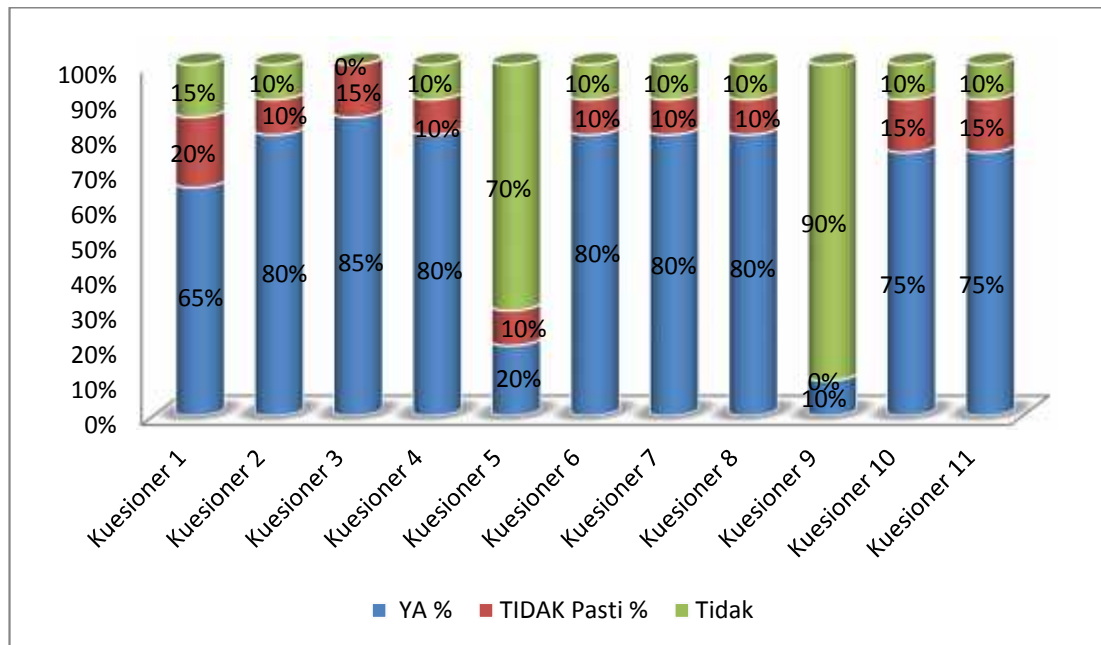
Terdapat 11 pertanyaan yang perlu dijawab oleh pihak responden untuk tujuan mengenal tahap kepuasan masyarakat terhadap Majelis *ul* di Mahkamah Syari'ah Selangor dan kesemua kuesioner adalah umum terhadap responden yang menghadiri ke Majelis *ul* .

Tabel 3 : Persentase Keseluruhan Responden Menjawab Kuesioner Yang Menghadiri ke Majelis *ul*

No	Tema	Persentase %		
		Ya	Tidak Pasti	Tidak
1	Puas dengan pelayanan Majelis <i>ul</i> di Mahkamah Syariah Selangor	65%	20%	15%
2	Pernah Mengetahui Kewujudan Majelis <i>ul</i> di Mahkamah Syariah Selangor	80%	10%	10%
3	Keberadaan Majelis <i>ul</i> dapat membuka pandangan positif masyarakat	85%	15%	-
4	Puas dengan pola yang diterapkan oleh Majelis <i>ul</i>	80%	10%	10%
5	Haruskah perbaikan pola penyelesaian yang diterapkan oleh Majelis <i>ul</i>	20%	10%	70%
6	Masa pelaksanaan Majelis <i>ul</i> dapat menghematkan waktu	80%	10%	10%
7	Biaya yang harus dibayar ke Majelis <i>ul</i> meringankan beban	80%	10%	10%
8	Menghadiri ke Majelis <i>ul</i> dapat menghilangkan stres dari persidangan	80%	10%	10%
9	Proses pelaksanaan di Majelis <i>ul</i> sangat sulit	10%	-	90%
10	Puas dengan peran Majelis <i>ul</i> menjadi mediator	75%	15%	10%
11	Penyelesaian kasus pertikaian keluarga di Majelis <i>ul</i> di Mahakamah Syariah Selangor dapat mengurangkan peningkatan kasus	75%	15%	10%
12	Jumlah	66%	12%	22%

Sumber dari : Pegawai *ul* Mahkamah Syari'ah Selangor Tahun 2018

Diagram 2 : Grafik Persentase Responden Yang Menjawab Kuesioner



Sumber dari : Pegawai ul Mahkamah Syari'ah Selangor Tahun 2018

Kuesioner pertama tentang apakah anda puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Majelis ul di Mahkamah Syari'ah Selangor. 65% pihak responden menyatakan Ya dan 20% menyatakan Tidak pasti dan 15% menyatakan Tidak. Melalui survei kuesioner kedua didapati bahwa 80% dari pihak responden pernah mendengar dan mengetahui secara umum tentang Majelis ul di Mahkamah Syari'ah baik dari media cetak, radio, kawan atau media sosial. 10% menyatakan Tidak pasti dan 10% lagi Tidak.

Kuesioner ketiga tentang keberadaan Majelis ul di bawah Mahkamah Syari'ah dapat membuka pandangan positif kepada masyarakat. Didapati bahwa 85%

menyatakan Ya dan 15% Tidak pasti. Mengenai kuesioner keempat tentang pola yang diterapkan Majelis *ul* dalam mediasi, pihak responden puas dengan pola yang diterapkan bahwa 80% responden menyatakan Ya, 10% Tidak pasti dan 10% Tidak. Kuesioner kelima terkait mengenai haruskah perbaikan pola penyelesaian yang diterapkan oleh Majelis *ul* didapati 20% responden menyatakan Ya, 10% Tidak pasti dan 70% Tidak. Berarti pola yang diterapkan Majelis *ul* tidak perlu penambah baik dari penilaian pihak yang menghadiri Majelis *ul* .

Melalui survei kuesioner keenam, ketujuh dan delapan mempunyai persentase responden yang sama. Didapati bahwa 80% pihak responden menyatakan Ya dan bersetuju tentang Majelis *ul* dapat meringankan biaya, meghematkan waktu dan dapat mengurangi stres dibandingkan di persidangan dan 10% menyatakan Tidak pasti dan 10% Tidak. Kuesioner kesembilan terkait tentang apakah proses mediasi yang dilakukan oleh Majelis *ul* sangat sulit didapati bahwa 10% menyatakan Ya dan 90% Tidak karena proses di Majelis *ul* tidak sesulit di persidangan.

Mengenai kuesioner kesepuluh dan kesebelas mempunyai persentase yang sama dari pihak responden didapati bahwa 75% menyatakan Ya dengan peran pegawai *ul* menjadi mediator dan penyelesaian di Majelis *ul* dapat mengurangi kasus yang meningkat di Mahkamah Syari'ah. 15% dari pihak responden menyatakan Tidak pasti dan 10% Tidak.

Kesimpulan dari hasil survei kuesioner ini penulis mendapati responden yang menghadiri Majelis *ul* ini, secara umumnya sangat puas dengan pelayanan dan pola

yang diterapkan oleh Majelis *ul* . Pihak bertikai yang menghadiri juga dapat menghematkan waktu dan meringankan biaya melalui proses Majelis *ul* berbanding proses di persidangan. Masyarakat bisa menyelesaikan pertikaian secara damai dengan menggunakan pelayanan Majelis *ul* sebelum melanjutkan proses persidangan

3.6. Analisa Penulis.

Berdasarkan analisa dari apa yang dapat penulis simpulkan dalam menyiapkan skripsi ini, bahwa konflik dan pertikaian adalah fitrah yang alami dalam kehidupan manusia. Konflik dan pertikaian sering terjadi dalam rumah tangga apabila satu pihak menghalang, menekan atau memaksa pihak kedua menerima pendapatnya yang kemudiannya pihak ini terasa tergugat dengan tindakan pihak yang pertama. Meskipun pertikaian boleh diselesaikan oleh pihak-pihak berkonflik namun kerap kali kasus kekeluargaan di bawa ke Mahkamah Syari'ah.

Kebanyakan manusia hari ini mau menyelesaikan masalah, pertikaian atau konflik dengan melihat dan memahami permasalahan yang dihadapi mengikut pandangan mereka sendiri tanpa berusaha memahaminya melalui pandangan pihak ketiga. Ini menyebabkan pertikaian tidak dapat diselesaikan dengan sempurna dan konflik masih terus berlaku. Peranan pihak ketiga dalam menyelesaikan pertikaian keluarga di Mahkamah Syari'ah amat dibutuhkan.

Masyarakat Islam di Malaysia sering menggunakan Mahkamah Syari'ah sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan pertikaian antara suami dan istri.

Mahkamah Syari'ah dianggap sebagai satu institusi mulia yang diharapkan boleh mendapatkan keadilan untuk suami dan istri yang sedang bersengketa. Tetapi bila tiada persetujuan antara kedua belah pihak yang bersengketa akan mengakibatkan kelambatan proses penyelesaian di persidangan dan penambahan kasus di Mahkamah Syari'ah.

Jesteru itu, diwujudkan Majelis *ul* di Mahkamah Syariah Selangor untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak Mahkamah Syari'ah. Terdapat pola yang diterapkan oleh Majelis *ul* untuk memastikan setiap kasus yang diselesaikan membawa keberhasilan. Pola ini dibuat agar kerja yang dijalankan oleh pegawai *ul* dalam proses perundingan berjalan dengan sistematika.

Selain itu, pegawai *ul* akan di berikan latihan selama 40 jam secara bertingkat agar mempunyai kualitas dalam pelaksanaan menyelesaikan kasus di Majelis *ul* . Latihan yang dijalani oleh pegawai *ul* untuk memastikan setiap pegawai *ul* mendapat sertifikat akreditasi mediasi.

Berdasarkan hasil penelitian, Mahkamah Syari'ah bertindak menyelesaikan konflik dan pertikaian dengan melantik pegawai *ul* untuk penyelesaian melalui Majelis *ul* . Terdapat dua ciri utama yang menjadi asas penyelesaian pertikaian yaitu tidak bertentangan dengan hukum syarak dan undang-undang dan persetujuan bersama. Penyelesaian diperoleh melalui pegawai *ul* yang berperan sebagai mediator dan konseling.

Apabila Enekmén Pentadbiran Keluarga Islam diperkenalkan Mahkamah Syari'ah di Selangor telah menetapkan bahawa kasus berkaitan pertikaian keluarga Islam hendaklah melalui pegawai *ul* sebelum di bawa ke depan hakim. Satu surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada pihak-pihak berkonflik untuk menghadiri sesi perundingan dengan pegawai *ul* dan pihak yang berkonflik wajib menghadirinya.

Proses perundingan hendaklah dijalankan tidak melebihi tiga bulan untuk mencari jalan kesepakatan. Seandainya penyelesaian tidak diperolehi, pegawai *ul* boleh merekomendasikan untuk diperpanjang atau dibawa ke depan hakim untuk proses persidangan. Pegawai *ul* di pertanggungjawabkan untuk melaksanakan negosiasi sehingga kesepakatan bersama dicapai. Pola yang diterapkan *ul* yang dilaksanakan di Selangor memiliki ciri-ciri mediasi dan telah menunjukkan keberhasilan yaitu dapat menyelesaikan sebagian besar pertikaian suami-istri bagi kasus Mal (kekeluargaan) tanpa menjalani proses persidangan di Mahkamah Syari'ah.

Sejak kaedah *ul* diperkenalkan di Mahkamah Syari'ah Selangor, banyak kasus dapat diselesaikan di luar mahkamah. Pada tahun 2017 dari Januari hingga Desember 2017, daripada 3367 kasus yang didaftarkan kepada Majelis *ul* , 1363 kasus berhasil diselesaikan, 564 kasus dibawa ke depan hakim untuk persidangan, sebagian sisa 1024 kasus tidak dihadiri oleh pihak bertikai. Pada persentase kasus

berhasil diselesaikan 71% dan persentase kasus yang ditangani oleh Majelis *ul* 88%.²⁰

Dari persentase yang dinyatakan pola yang diterapkan oleh Majelis *ul* dalam mediasi pertikaian keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor menunjukkan efektivitas dalam mengurangi kasus yang meningkat dan membantu meringankan beban yang dilalui oleh pihak Mahkamah Syari'ah. Jika dilihat banyak kebaikan yang menerusi pelaksanaan Majelis *ul* dan pihak yang menghadiri *ul* sangat puas dengan pola yang diterapkan oleh Majelis *ul* .

Selain itu juga, peneliti membuat kuesioner untuk mengetahui tahap kepuasan pihak yang menghadiri ke Majelis *ul* . Dari hasil kuesioner yang dilakukan oleh peneliti didapati pihak yang menghadiri ke Majelis *ul* sangat puas dengan pola yang diterapkan di Majelis *ul* dan membantu pihak bertikai untuk mendapatkan jalan kesepakatan tanpa ada kerugian. Ini membuktikan bahwa Majelis *ul* di Mahkamah Syari'ah sangat membantu pihak yang bertikai dalam menyelesaikan kasus.

²⁰ Hasil wawancara dengan Tuan Mohd Suhail Bin Mohd Najid, Pegawai *ul* Mahkamah Syari'ah Selangor, Komunikasi Personal melalui email pada tanggal 24 April 2018

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bab empat ini sebagai bab akhir dari karya ilmiah yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Maka dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan tentang efektivitas Majelis *ul* dalam memediasi pertikaian keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor adalah sebagai berikut :

1. Dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pola yang di terapkan Majelis *ul* membantu pegawai *ul* menjalankan proses penyelesaian kepada pihak bertikai. Karena proses yang berhasil di Majelis *ul* tidak perlu melalui proses persidangan dan proses yang gagal akan melalui proses ke tahap persidangan. Pola yang diterapkan lebih efektif berbanding pola di persidangan karena di Majelis *ul* pihak bertikai dapat mengklaim hak masing-masing tanpa ada kerugian antara kedua belah pihak (*win-win situation*).
2. Penulis mendapati bahwa Majelis *ul* di Mahkamah Syari'ah Selangor ternyata sangat efektif dalam penyelesaian kasus yang didaftarkan seperti nafkah anak, hak *a nah*, harta bersama dan kasus-kasus yang lain. Berdasarkan statistik yang dicatatkan dari tahun 2013–2017 sebanyak 13,962 kasus yang di daftarkan dan kasus berhasil diselesaikan sebanyak 5925 kasus, tidak berhasil 2562 kasus dan para pihak tidak menghadiri sebanyak 3868 kasus. Dari angka kasus yang dinyatakan, peneliti dapat

menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang menghadiri Majelis *ul* sangat puas dengan pola yang diterapkan Majelis *ul* di Mahkamah Syari'ah Selangor dan sangat efektif kepada pihak yang berselisih untuk mendapatkan jalan penyelesaian.

4.2. Saran-saran

Saran-saran yang dapat dirumuskan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Di harapkan pihak Mahkamah Syari'ah perlu ada penyuluhan-penyuluhan hukum sebagai sosialisasi baik melalui media cetak, seminar mengenai mediasi di Majelis *ul* agar memberi kesadaran hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat mengenali Majelis *ul* .
2. Penulis dapat menyatakan pola *ul* akan lebih efektif, jika peran yang dilaksanakan terlibat oleh semua pihak. Pengacara harus mendorong pihak-pihak pertikaian melalui proses Majelis *ul* dan berfikiran terbuka dalam menghadiri Majelis *ul* .

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah bin ‘Abdurra man Al-Bass m, *Syara B l ghul Mar m, jilid4*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- ‘Abdul Q dir Syaibah al- amad, *Fiq ul Islam Syara B l ghul Mar m Jilid 5*. Jakarta: D rul Haq, 2007.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ab Bakar J bir Al-Jaza’iri, *Min aj al-Muslim Panduan Hidup Muslim Sempurna*, cet 1. Malaysia: Karangkrif, 2015.
- Ab ‘Abdullah Mu ammad, *a i Al-Bukh ri*, Bierut: D r Al-kitab Al-‘limiyah, 1992.
- Abu D d Sulaim n, *Sunan Abu D d*, jilid 2, Beirut: D r fikih, 2003.
- Adzidah Yaakob, Mohamad Zaharuddin Zakaria, Asmidah Ahmad, Kamilah Wati Mohd, Mustafa Afifi Ab Halim, *Pengenalan dan Keberkesanan Sulh Di Mahkamah Syariah*, Negeri Sembilan: Universiti Sains Islam Malaysia, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian keluarga Muslim*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan Edisi Pertama*, Cet2, Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992
- Fai al bin ‘Abdul ‘Aziz ‘Alu Mub rak , *B l ghul Mar m & Penjelasannya* , Jakarta : Ummul Qura , 2015.
- Hammad, Mohamad Azhan, *Kedudukan Pegawai Sulh Di Mahkamah Syariah, (IRSYAD no 1090)*, Malaysia: Kuis, 2016.
- Hussamuddin Yaacub, *Al-Quran Perkata Kaedah Berwarna*, Malaysia: Karya Bestari, 2016,
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

- Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet.1, Indonesia: Kencana, 2011
- M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Mu ammad asb ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul M jid Al-N r Jilid 1*, surat 1-4. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Mu ammad Nashiruddin Al-'b ni, *a i Sunan Tirmid i* (Seleksi Hadis a ih dari Kitab Sunan Tirmid i Buku no 2), Cet 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Norita Kamaruddin, *Konsep ul Menurut Perspektif Islam Dan Aplikasinya Dalam Mahkamah Syari'ah Di Malaysia, (IRSYAD no 1002)*, Malaysia: Kuis, 2016.
- Norzulaili Mohd Ghazali, Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Alquran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*. Malaysia: Kolej Universiti Islam Malayisa (KUIM), 2007
- Raihanah Azahari, *ul dalam Kasus Kekeluargaan Islam*, Malaysia : Universitas Malaya, 2008
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet.10, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010
- Suzana Ghazali, *Buatmu Wanita: Sebagai Anak Istri- Ketahui Hakmu*, Selangor Darul Ehsan : Buku Prima Sdn.Bhd, 2009
- Syarizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : Raja Grafindo, 2010
- Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh (Jaminan, Pengalihan Utang, Gadai Paksaan, Kepemilikan)*, Jilid 6 (Kuala Lumpur : Darul Fikir, 2011)

Sumber-Sumber Lain

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syari'ah Negeri Selangor 2001 dibawah seksyen 147 (1) (c) ETMMS(S) 2003

Enakmen 4 Tahun 2003, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syari'ah (Negeri Selangor) 2003 Bahagian Xiii-Penyelesaian dan Penarikan Balik

Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor, Pelan Strategik 2015-2020 (Vol. 2), (Malaysia: JAKESS, 2015).

Ibrahim Lembut, Arahan Amalan No.1 Tahun 2010, Penentuan Kasus Yang Perlu Dirujuk Ke Majelis *ul* Pada Peringkat Pendaftaran Kasus, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, 2010

Mahkamah Syari'ah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu Ensiklopedia Bebas*, Diakses melalui situs: https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syari'ah_di_Malaysia, pada tanggal 11 April 2018

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, *Seksyen Sulh*, Diakses melalui situs: <http://www.mswp.gov.my/index.php/ms/mengenai-mswp-2/bahagian-unit/bahagian-pengurusan-pendaftaran-kehakiman/seksyen-sulh>, pada tanggal 15 Mei 2018

Sheikh Ghazali Bin Hj. Ab. Rahman, Arahan Amalan No. 8 Tahun 2002, Tempoh Masa Pengemukaan Nota Perbicaraan Bagi Maksud Rayuan, Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia, 2002

Seksyen 61 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 1/2003

Seksyen 99 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syari'ah (Negeri Selangor) 2003.

www.esyariah.gov.my, *Esyari'ah*, Diakses melalui situs: <http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/BM+Sulh/Proses+Pengendalian+Majlis+Sulh+Di+Mahkamah+Syariah>, pada tanggal 21 April 2018

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 2321/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | 1. a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi. |
| Mengingat | 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. |

M E M U T U S K A N

- | | | |
|------------|--|-----------------------|
| Menetapkan | | |
| Pertama | Menunjuk Saudara (i) : | |
| | a. Dr. H. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL | Sebagai Pembimbing I |
| | b. M. Iqbal, SE, MM | Sebagai Pembimbing II |
| | untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) : | |
| | Nama : Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam | |
| | NIM : 160101129 | |
| | Prodi : Hukum Keluarga | |
| | Judul : Efektifitas Majelis Sulh Dalam Mediasi Perikatan Keluarga di Mahkamah Syariah Selangor | |
| Kedua | Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; | |
| Ketiga | Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018. | |
| Keempat | Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. | |
| | Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. | |

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 5 Juni 2018
 Dekan


 Hasanuddin

Tambahan :

Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2633/Un.08/FSH.I/07/2018

18 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Tinggi Syariah Selangor
2. Pegawai Sulh Mahkamah Syariah
3. Ketua Mahkamah Syariah Daerah Hulu Langat
4. Hakim Mahkamah Syariah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam
 NIM : 160101129
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
 Alamat : Grand Lampeudaya

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsil yang berjudul, "**Efektifitas Majelis Sulh Dalam Mediasi Pertikaian Keluarga di Mahkamah Syariah Selangor**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 dan
 Wakil Dekan I,

 Rifwan Nurdin

Lampiran 3



جہاتن کحاکیمن شریعہ سلانور دارالاحسان

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR DARUL EHSAN

BANGUNAN MAHKAMAH SYARIAH SULTAN IDRIS SHAH,
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,
40000 SHAH ALAM,
SELANGOR DARUL EHSAN
TEL : 03-55191291, 55191294, 55113708, 55191304
FAXS : 03-55108620, 55126068



Laman Web: www.jakps.gov.my

KEPADA

AZFAR NAUFAL BIN SAIFUL NIZZAM,
NO. 6, TAMAN LEMBAH MEWAH, BT 15, JLN SEMENYIH,
43000 KAJANG, SELANGOR.

**SURAT KELULUSAN PERMOHONAN DARIPADA
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR**
BANGUNAN MAHKAMAH SYARIAH SULTAN IDRIS SHAH
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

Ruj Kami: JAKESS 600-G/1/3 Jld B (77)
Tarikh: 14/8/2018

**PERMOHONAN UNTUK MENGAKSES MAKLUMAT DI
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR
DI BAWAH ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT (NEGERI SELANGOR) 2011**

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa permohonan tuan/puan untuk mengakses maklumat di Jabatan ini No. *Permohonan 252* diluluskan /tidak diluluskan berdasarkan Jadual Kedua, Peraturan-Peraturan yang tersebut seperti Jadual 2 di bawah -

Bil.	Perihal	Fi (RM)	Ditandakan Oleh Pegawai Maklumat
1	Mencari dan mendapatkan maklumat dan memulangkan maklumat ke tempat simpanan	10.00	(✓)
2	Mempertimbangkan dan membuat keputusan berhubung permohonan yang dibuat (termasuk konsultasi)	10.00	(✓)
3	Mementau pemeriksaan maklumat oleh pemohon	10.00	(✓)
4	Menyewa peralatan atau kemudahan untuk membolehkan pemohon melihat atau mendengar cakera padat, filem atau kaset	Kos Sebenar	()
5	Mengendalikan peralatan untuk membuat salinan cakera padat, filem atau kaset untuk membolehkan pemohon melihat atau mendengar cakera padat, filem atau kaset	10.00	()
6	Ferkhidmatan-perkhidmatan lain bagi membolehkan pemohon mengakses maklumat secara fizikal	Kos Sebenar	()
7	Fotokopi (jika ada)	(a) 20 sen setiap muka surat (b) Kos sebenar	()
8	Salinan cakera padat, filem atau kaset	Kos sebenar	()

"Membangun Bangsa Memakmur Negeri"



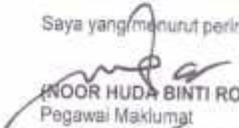
9	Transkripsi bertulis	Kos sebenar	()
10	Bahan-bahan untuk pembungkusan bagi menghantar atau mengepos barang	Kos sebenar	()
11	Caj penghantaran atau pengeposan	Kos sebenar	()
JUMLAH YANG PERLU DIBAYAR		RM 30/-	
<i>Bayaran Fi hendaklah dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam/ Mahkamah Rendah Syariah *Sila potong mana yang tidak berkenaan</i>			
Untuk Kegunaan Pejabat			
<i>Sila berhubung dengan Tuan Sahail atau penjawatannya.</i>			
SILA AMBIL PERHATIAN TIDAK DIBENARKAN MEMBUAT SALINAN SEBARANG DOKUMEN DALAM FAIL KES			

**potong mana yang tidak berkenaan*

Sekian, terima kasih.

"MEMBANGUN BANGSA MEMAKMUR NEGERI"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"SYARIAH ASAS KEADILAN"

Saya yang menurut perintah,


(NOOR HUDA BINTI ROSLAN) AMS
Pegawai Maklumat
Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

Lampiran 4



Kantor Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor



Ruang pendaftaran kasus kekeluargaan di Mahkamah Syari'ah Selangor



Contoh proses perundingan Majelis *ul* di Mahkamah Syari'ah Selangor



Salah seorang Pegawai *ul* yang bertugas di Mahkamah Syari'ah Selangor

Lampiran 5

LAPORAN KESELURUHAN
STATISTIK KES SULH
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR
(PERBANDINGAN 2013-2017)

TAHUN	DAFTAR	SELESAL			PERATUSAN KES SELESAL (%) *	PERATUSAN KES SELESAL - BERJAYA (%) **
		BERJAYA	GAGAL	TAK HADIR		
2013	2,481	1048	564	666	91 %	65 %
2014	2,534	1045	484	758	90 %	68 %
2015	2,598	1,144	463	631	86 %	71 %
2016	2,972	1,325	487	789	88 %	73 %
2017	3,367	1,363	564	1024	88 %	71 %

i) Formula Pengiraan Peratusan Kes Selesal : $\frac{(\text{Berjaya} + \text{Gagal} + \text{Tak Hadir})}{\text{Jumlah Daftar}} \times 100 \%$

ii) Formula Pengiraan Peratusan Kes Selesal - BERJAYA : $\frac{\text{Berjaya}}{(\text{Berjaya} + \text{Gagal})} \times 100 \%$

Lampiran 6



جباتن كحاكيمان شرعية مليسيا
 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM)

Ruj. Tuan :
 Ruj. Kami : JKSM/100-24/5 (14)
 Takwim : 14 Jamadil Akhir 1423
 Tarikh : 23 Ogos 2002

Y.A.A. Ketua-Ketua Hakim Syarie,
 Mahkamah-mahkamah Syariah Negeri-negeri

Arahan Amalan No. 3 Tahun 2002

Pemakaian Sulh

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil. 3 Tahun 2002 pada 7 Mei 2002 di Johor Bahru bersamaan 25 Safar 1423 telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung semua kes-kes selepas didaftarkan, hendaklah dengan seberapa segera tidak melebihi 21 hari dirujuk kepada Pengerusi Majlis Sulh dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk sesi Sulh / penyelesaian damai, sebarang persetujuan yang dicapai hendaklah dicatatkan dan dibacakan semula di hadapan pihak-pihak dan terus dipanjangkan kepada Hakim untuk direkodkan Perintah Persetujuan Bersama.

2. Bagi kes yang gagal di peringkat ini hendaklah terus ditetapkan tarikh perbicaraan setelah semua prosiding kes dipenuhi. Bagi maksud pemakaian sistem Sulh ini ianya tidak terpakai ke atas kes-kes Pembubaran Perkahwinan dan Nasab.

Arahan amalan ini berkuatkuasa serta merta.

(Dato' Sheikh Ghazali Bin Hj. Ab. Rahman)
 Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie
 Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

PUTRAJAYA
 2002



جائز كها كمين شرعية ماليا
KETUA PENGARAH/KETUA HAKIM SYARIE
 Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
 Aras 2 & 3, Blok D7, Parcel D,
 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
 62677 PUTRAJAYA

Tel.: 03-8896 4100
 8886 4889
 Faks: 03-8899 1631
 email: inf@mkysj.gov.my
 Laman Web: www.jkm.gov.my

Ruj. Kami : JKSM.BPKR/100-5/5/2 Jld. 2 (9)

Tarikh : 16 Sya'ban 1431H/
 28 Julai 2010M

**Y.A.A Ketua -Ketua Hakim Syarie,
 Mahkamah-mahkamah Syariah
 Negeri-negeri.**

ARAHAN AMALAN NO. 1 TAHUN 2010

Penentuan Kes Yang Perlu Dirujuk Ke Majlis Sulh Pada Peringkat Pendaftaran Kes

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Mahkamah Syariah Bil. 1 Tahun 2010 pada 14 Sya'ban, 1431H bersamaan 26hb. Julai 2010 telah bersetuju dan mengesahkan bahawa kes-kes yang dinyatakan di bawah ini perlu dirujuk ke Majlis Sulh semasa peringkat pendaftaran kes di Mahkamah Syariah.

- 009 - Tuntutan Gantirugi Pertunangan
- 016 - Tuntutan Muta'ah
- 017 - Tuntutan Harta Sepencarian
- 018 - Tuntutan Nafkah Isteri
- 019 - Tuntutan Nafkah Kepada Pihak Tak Upaya
- 020 - Tuntutan Cagaran Nafkah
- 021 - Tuntutan Nafkah Eddah
- 022 - Tuntutan Mengubah Perintah Nafkah
- 023 - Tuntutan Tunggakan Nafkah
- 024 - Tuntutan Nafkah Anak
- 025 - Tuntutan Mengubah Perintah Hak Jagaan Anak/Nafkah Anak
- 026 - Tuntutan Mengubah Perjanjian Hak Jagaan Anak/Nafkah Anak
- 028 - Tuntutan Hadhanah
- 049 - Tuntutan Gantirugi Perkahwinan
- 059 - Tuntutan Hak Tempat Tinggal
- 060 - Tuntutan Perintah Supaya Suami Tinggal Bersama Semula
- 062 - Tuntutan Isteri Kembali Taat
- 063 - Tuntutan Mas Kahwin

2. Bagi kes-kes ex-parte (interim) tidak perlu melalui proses Sulh.
3. Bagi kes-kes yang telah melalui proses pengantaraan di Jabatan Bantuan Guaman Malaysia tidak perlu dirujuk ke Majlis Sulh pada peringkat pendaftaran
4. Arahan Amalan No. 1 Tahun 2000, No. 9 Tahun 2003, No. 14 Tahun 2004 dan No. 14 Tahun 2005 adalah berkaitan.

Arahan ini berkuatkuasa mulai 30 Julai 2010.



(Tan Sri Ibrahim Lembang)
Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syariah
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.
PUTRAJAYA

Lampiran 7

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Nama: Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam

Judul: Efektifitas Majelis *ul* Dalam Mediasi Pertikaian Keluarga di Mahkamah Syari'ah Selangor



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

Soalan Wawancara Pegawai Sulh:

- 1) Bila ditubuhkan Jabatan Kehakiman Syariah di negeri Selangor?
- 2) Bila ditubuhkan majelis sulh di Mahkamah Syariah Selangor?
- 3) Apakah Kelayakan Pegawai Sulh di Mahkamah Syariah Selangor?
- 4) Apakah yang menjadi faktor berhasil suatu Majelis Sulh?
- 5) Kenapa pola yang diterapkan menjadi tarikan para pihak yang menghadiri Majelis Sulh?
- 6) Apakah Tindakan akan dikenakan sekiranya para pihak tidak menghadiri Majelis Sulh?
- 7) Apakah faktor kegagalan Pegawai Sulh dalam menyelesaikan pertikaian di Majelis Sulh?
- 8) Apakah kes yang didaftarkan dalam proses majelis sulh dan kes apa yang paling banyak di daftarkan?
- 9) Adakah cara yang diterapkan majelis sulh memberi keberkesanan dalam peratusan pengurangan kes yang didaftarkan di Mahkamah Syariah?
- 10) Bagaimana pegawai sulh menyelesaikan kes yang tidak berhasil dalam proses mediasi?
- 11) Apakah cara yang diterapkan oleh pegawai sulh dalam menyelesaikan pertikaian keluarga dalam proses mediasi di mahkamah syariah?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**BORANG SOAL SELIDIK TAHAP KEPUASAN PIHAK BERTIKAI YANG
 MENGHADIRI PROSES MAJELIS SULH**

**BAHAGIAN A: DEMOGRAFI SILA TANDAKAN ✓ DI DALAM KOTAK YANG
 BERKAITAN SAHAJA DI BAHAGIAN A INI**

USIA: 18-25 26-30 31-35
 36-40 41-45 46-50

STATUS : BERKAHWIN BERCERAI

KETURUNAN: MELAYU CINA
 INDIA LAIN-LAIN NYATAKAN.....

PEKRJAAN: KERAJAAN SWASTA KERJA SENDIRI

KELAMIN : LELAKI PEREMPUAN

**BAHAGIAN B: PILIH SKALA MENGIKUT PNGETAHUAN ANDA DAN TANDAKAN
 ✓ PADA KOTAK : (1)YA (2)TIDAK PASTI (3)TIDAK**

ARAHAN: Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menilai tahap kepuasan pihak pertikai yang menjalani dan menghadiri Majelis Sulh di Mahkamah Syariah Selangor

BIL.	SOAL SELIDIK	1	2	3
1	Adakah anda mengetahui pelayan Majelis Sulh di Mahkamah Syariah Selangor			
2	Adakah anda pernah mendengar kewujudan Majelis Sulh di bawah Mahkamah Syariah dan jika pernah nyatakan dimana.....			
3	Adakah dengan kewujudan Majelis Sulh di bawah Mahkamah Syariah dapat membuka pandangan positif kepada anda dan masyarakat			
4	Adakah anda berpuas hati dengan cara yang diterapkan oleh Majelis Sulh dalam proses penyelesaian pertikaian dalam mediasi			
5	Adakah anda merasakan Majelis Sulh harus memperbaiki cara penyelesaian kasus yang dilaksanakan			
6	Adakah anda setuju masa penyelesaian Majelis Sulh dapat menjimat waktu dalam penyelesaian suatu kasus di Mahkamah Syariah			
7	Adakah anda berpuas hati dengan kos pembayaran yang dikenakan oleh Majelis Sulh dapat meringankan beban berbanding persidangan.			
8	Adakah anda merasakan dengan menghadiri Majelis Sulh dapat mengurangkan tekanan yang di alami berbanding di persidangan			
9	Adakah anda merasakan proses mediasi yang dijalankan oleh Majelis Sulh sangat sulit			
10	Adakah anda berpuas hati pelaksanaan Majelis Sulh dapat membantu menyelesaikan sesuatu kasus di Mahkamah Syariah.			
11	Adakah anda berpuas hati penyelesaian kes pertikaian kekeluargaan dalam majelis sulh dapat mengurangkan kasus yang meningkat di Mahkamah Syariah			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri

Nama : Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam
 Tempat/Tanggal Lahir : Selangor, 31 Maret 1994
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Alamat : No 6, Taman Lembah Mewah Bt 15
 Jalan Semenyih 43000 Kajang,
 Selangor Darul Ehsan

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Saiful Nizzam Bin Abdul Rahman
 Nama Ibu : Umiminarni Binti Dasuki
 Pekerjaan Ayah : Swasta
 Pekerjaan Ibu : Swasta
 Alamat : No 6, Taman Lembah Mewah Bt 15
 Jalan Semenyih 43000 Kajang,
 Selangor Darul Ehsan

3. Riwayat Pendidikan

Sekolah Rendah Kebangsaan : Tahun 2000-2006
 SAM Sg. Merab Luar : Tahun 2007-2011
 Kolej Universitas Islam Melaka : Tahun 2013-2015
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry : Tahun 2016-2019

Banda Aceh, 16 Januari 2019
 Penulis,

Azfar Naufal Bin Saiful Nizzam
 NIM. 160101129